

Faizal, M.Ag.

Drs. Mansur Hidayat, M.Sos.I

POTENSI SUMBER DAYA LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SELAMAT DATANG DI KOTA AGUNG



Harakindo
Publishing

**POTENSI SUMBER DAYA LOKAL
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Faizal, M. Ag.

Drs. Mansur Hidayat, M. Sos. I

PENERBIT



Harakindo Publishing
Bandar Lampung

POTENSI SUMBER DAYA LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Faizal, S. Ag., M. Ag.
Drs. Mansur Hidayat, M. Sos. I

ISBN 978-602-1689-98-1

Januari 2017
Edisi Pertama, Cetakan I, Januari 2017
Desain Cover : Harakindo Creative
VII, 164 hal; 16,5 x 23 cm

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
@ Faizal, S. Ag., M. Ag. 2017
@Drs. Mansur Hidayat, M. Sos.I. 2017

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebahagian
Atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis penulis

Diterbitkan oleh
Harakindo Publishing
Anggota IKAPI-No.004/LPU/2017
Jl. Sentot Alibasya No. 1 Korpri Jaya Kec. Sukarame
Bandar Lampung, email: harakindo.lpg@gmail.com,
Telp. 0721-772539

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur di haturkan kepada Allah SWT, berkat rahmat, hidayah, dan maunah-Nya karya ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah SAW.

Karya ini menyajikan teori-teori tentang pemberdayaan masyarakat desa dan optimalisasi potensi sumber daya lokal. Teori-teori tersebut dijadikan sumber referensi dalam mengkaji proses pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal. Oleh sebab itu, karya yang sederhana ini diharapkan akan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan bacaan atau rujukan dalam proses pemanfaatan sumber daya dalam pemberdayaan masyarakat.

Tim Penulis menyadari, bahwa hasil karya ini ini jauh dari sempurna, baik dalam sistematika berfikir maupun sistematika penulisan. Untuk itu, Tim Penulis mengharapkan sumbang saran kepada pembaca untuk kesempurnaan karya ini.

Karya ini selesai atas sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tim penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan upaya yang telah kita lakukan akan mendapat balasan dari Allah SWT dan bermanfaat bagi kita pribadi, lembaga, dan masyarakat pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Nov. 2015
Tim Peneliti,

DAFTAR ISI SEMENTARA

HALAMAN JUDUL	i.
KATA PENGANTAR	iv.
DAFTAR ISI	v.
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	9
C. Kontribusi Penulisan	10
D. Teori-Teori Dasar dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	11
E. Kerangka Pemikiran.....	24
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II. OPTIMALISASI PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
A. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal	31
1. Perspektif dan Ruang Lingkup Pemberdayaan.....	31
2. Prinsip-Prinsip dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	34
3. Pemberdayaan Berbasis Lokalitas	38
B. Optimalisasi Sumber Daya Lokal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	40
1. Potensi Sumber Daya Alam/Lingkungan	41
2. Potensi Sumber Manusia	51
3. Potensi Sumber Daya Sosial	54
C. Pemetaan Sumber Daya Pembangunan Masyarakat....	57
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sift Penelitian.....	60
B. Populasi dan Sampel	61
D. Metode Analisa Data	63

BAB IV. WILAYAH DESA DAN SUMBER DAYA LOKAL DALAM KEBERDAYAAN MASYARAKAT	
A. Desa/Pekon dalam Pemberdayaan.....	64
B. Potensi Pemberdayaan Sumber Daya Bagi Kesejahteraan Masyarakat	100.
1. Potensi Sumber Daya yang dapat Diberdayakan	100.
2. Proses Pemberdayaan Sumber Daya Bagi Kesejahteraan Masyarakat	110.
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan masyarakat desa merupakan *grand topic* atau isu utama sekaligus program unggulan pada hampir setiap periode pemerintahan di Indonesia. Persoalan tersebut masih dianggap penting paling tidak karena dua alasan, yakni: *pertama*, perkembangan kota berlangsung dengan sangat cepat, tetapi wilayah negara ini didominasi oleh daerah pedesaan. *kedua*, kondisi sosial ekonomi pedesaan masih memprihatinkan, walaupun berbagai kebijakan dan program pembangunan masyarakat diarahkan pada pembangunan masyarakat desa.¹ Selain itu, menurut Sunyoto Usman, kebijakan pemerintah tentang pembangunan menempatkan pembangunan pedesaan pada posisi yang terpisah dari pembangunan perkotaan. Baik dari perencanaan pembangunan maupun implementasi yang diterapkan, pemerintah beranggapan, bahwa pembangunan pedesaan memiliki karakteristik, regulasi, perkembangan dan perubahan yang berbeda dengan pembangunan perkotaan. Padahal, antara pedesaan dan perkotaan memiliki beberapa hubungan, diantaranya:

Pertama, ada hubungan yang signifikan antara diversifikasi dan peningkatan hasil produksi pedesaan dengan pertumbuhan kota.

¹ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 29-30

Kedua, ada hubungan yang signifikan antara diversifikasi dan peningkatan hasil produksi pedesaan dengan pertumbuhan pusat-pusat perdagangan di perkotaan. *Ketiga*, ada hubungan yang signifikan antara pluktuasi kesempatan kerja di pedesaan dengan arus urbanisasi.²

Realitas tersebut mengakibatkan stagnasi pembangunan di pedesaan, karena urbanisasi mengakibatkan kekurangan sumber daya manusia (SDM) sebagai sumber daya utama pembangunan. Akibatnya, sumber daya-sumber daya pembangunan yang lain terabaikan atau tidak mampu dikelola dengan baik, seperti; sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber sosial.

Secara kuantitatif, SDM pedesaan sangat besar sesuai dengan besarnya wilayah pedesaan, tetapi secara kualitatif SDM pedesaan jauh tertinggal dibandingkan SDM diperkotaan. Sehingga, besarnya jumlah penduduk, disamping merupakan potensi pembangunan yang sangat besar juga menjadi beban bahkan ancaman pembangunan, karena besarnya laju pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan tersedianya lapangan pekerjaan.

Demikian halnya dengan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh pedesaan sangat besar dan beragam. Mulai dari sumber daya air, pertanian, perkebunan, hutan, dan lingkungan sampai pada sumber pertambangan. Kesemuanya adalah sebagai sumber ekonomi atau pendapatan masyarakat desa dalam mencapai kualitas hidup.

² *Ibid.*, h. 16-17

Tetapi, sumber daya yang sangat besar dan beragam tersebut hanya mampu dimanfaatkan seadanya untuk kebutuhan konsumtif sesaat.

Yang tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah budaya dan spiritual yang melekat secara turun temurun, melekat dan menjadi ciri khas masyarakat desa. Kedua bidang ini terabaikan, seakan-akan hanya merupakan lambang serta media dan instrumen ritualitas budaya yang dianggap sakral ketika kegiatan adat-istiadat dan upacara perkawinan saja.

Betapapun besarnya sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, dan spiritual yang disediakan oleh wilayah pedesaan tanpa dikelola dengan baik, maka akan sedikit sekali memberikan manfaat apalagi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai permasalahan sebagai akibat dari ketidakberdayaan masyarakat desa yang terakumulasi dalam bentuk keterbelakangan semakin terlihat nyata. Misalnya; *Pertama*, sifat masyarakat yang tradisional yang terkait dengan nilai-nilai asli (primordial). *Kedua*, rendahnya sistem dan mutu pendidikan mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat desa dalam mengelola potensi sumber daya yang ada pada lingkungannya. *Ketiga*, rendahnya pendapatan, modal, dan keterampilan menyebabkan lingkaran kemiskinan tidak berujung pangkal dan menjadi permasalahan global. *Keempat*, tingkat urbanisasi yang tinggi. *Kelima*, tingginya pertumbuhan penduduk usia kerja yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja. *Keenam*, tidak adanya

kestabilan politik yang ditandai dengan pengelompokan kekuatan-kekuatan yang saling mendiskreditkan.³

Keterbelakangan masyarakat, khususnya masyarakat desa sebagaimana dalam enam indikator di atas, merupakan akibat dari program pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan *top down*. Pendekatan *top down* mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, tetapi pertumbuhan tersebut akan berputar pada orang atau kelompok-kelompok tertentu yang secara ekonomi memiliki modal yang besar dan secara politik memegang kendali dalam pemerintahan dan kekuasaan. Sementara, masyarakat yang nota bene jumlahnya sangat besar hanya menjadi obyek pembangunan. Mereka tidak memiliki peluang untuk berpartisipasi secara luas apalagi menikmati hasil pembangunan.

Pendekatan pembangunan yang dianggap gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil, mendorong upaya dan pemikiran untuk melahirkan konsep alternatif. Pada tahun 90-an muncul konsep pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*) atau sering disebut dengan istilah pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), yakni pemberdayaan yang didasarkan pada potensi wilayah sekitar masyarakat atau pemberdayaan berbasis potensi sumber daya lokal.

³ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Pemikiran tentang Tiori dan Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), h. 7-9

Sumberdaya lokal adalah sumberdaya yang tersedia atau digali dari wilayah setempat yang masih termasuk dalam batas geografis komunitas atau lingkungan sosialnya.⁴ Baik sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun sumber daya sosial.⁵ Pemberdayaan berbasis sumberdaya lokal atau potensi lokal menjadi awal untuk mendorong partisipasi aktif dan kemandirian masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.⁶ Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan merumuskan program yang didesain untuk mengatasi masalah yang mereka alami.⁷

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya atau potensi lokal merupakan perubahan paradigma pembangunan masyarakat desa. Dimana paradigma pembangunan pada era orde baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan *top down* telah mengabaikan partisipasi dan potensi masyarakat lokal. Kebijakan, program, dan pelaksanaan pembangunan didesain oleh pemerintah sementara masyarakat

⁴ Aprillia Theresia dkk., *Pengembangan Berbasis Masyarakat Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 33

⁵ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 131-132

⁶ *Ibid.*,

⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 61-62

hanya ditempatkan sebagai obyek. Partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan wilayahnya sendiri bagaikan patamorgana dan walaupun ada hanya sebatas simbolik dan retorika, terlibat tapi tidak memiliki kebebasan berkreasi untuk memperjuangkan nasib mereka.

Sementara itu, paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan rekayasa dalam mengelola sumberdaya yang tersedia pada wilayah dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.⁸ Kemandirian yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi biasanya tumbuh dari kesadaran terhadap beberapa hal, diantaranya: *Pertama*, kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki. *Kedua*, kondisi yang harus diperbaiki oleh kekuatannya sendiri. *Ketiga*, kemampuannya dalam berpartisipasi. *Keempat*, adanya kepercayaan bahwa ia mampu.⁹

Untuk menumbuhkan partisipasi dan kemandirian yang dilandasi keikhlasan sebagaimana tersebut di atas, bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi membutuhkan proses fasilitasi dan proses pembelajaran yang intensif. Karena masyarakat telah terbiasa dan larut dengan kondisi ketergantungan yang menyebabkan sifat pasif yang nyaris mematikan kreatifitas untuk perubahan.

Bertitik tolak dari kegagalan pembangunan dimasa lalu, maka dirasakan menjadi tuntutan untuk mengimplementasikan konsep pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural*

⁸ *Ibid.*, h. 80

⁹ *Ibid.*, h. 82

development), sehingga masyarakat mampu meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup serta memperkuat kemandirian.¹⁰ Menurut Waterston dalam Usman yang dikutip oleh Suparjan, ada enam elemen dasar yang melekat dalam program pembangunan masyarakat desa terpadu, yakni; *pertama*, pembangunan pertanian dengan mengutamakan padat karya; *kedua*, memperluas kesempatan kerja; *ketiga*, intensifikasi tenaga kerja skala kecil dengan cara mengembangkan industri kecil; *keempat*, meningkatkan partisipasi masyarakat; *kelima*, mengembangkan daerah perkotaan sebagai pendukung pembangunan pedesaan; dan *keenam*, membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi dengan proyek multisektor.¹¹ Baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan maupun bidang spiritual.

Pelaksanaan program pembangunan masyarakat desa terpadu tidak dapat serta merta dilakukan, tanpa mengetahui potensi sumberdaya lokal yang dimiliki oleh suatu wilayah atau komunitas, baik potensi yang berupa kekuatan maupun potensi hambatan. Untuk itu, maka diperlukan proses pemetaan dan analisis secara komprehensif tentang wilayah yang akan diberdayakan.

Banyak desa atau wilayah dinegeri ini yang jauh dari kemandirian. Salah satu wilayah desa yang selalu menjadi perhatian

¹⁰ Suparjan, *Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), h. 27

¹¹ *Ibid.*, h. 27

penulis apabila ke desa yang desa tersebut belum mandiri dan tingkat partisipasinya tergolong rendah adalah desa atau dalam terminologi administrasi pemerintahan Kabupaten Tanggamus dikenal dengan sebutan Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Tanggamus. Pekon tersebut terletak disekitar perkantoran sekaligus akses utama Kabupaten Tanggamus dan berdiri secara definitif sebagai pemerintahan sejak tahun 1921.

Pekon Kampung Baru merupakan jalur utama lintas barat Provinsi Lampung. Posisi desa (pekon) yang berada di lintas Barat menjadikan desa ini dilewati oleh ratusan kendaraan yang melintas siang dan malam. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berjualan atau menjajakan hasil perkebunan mereka kepada penumpang kendaraan yang lewat, baik berupa duren, duku, manggis dll.¹² Sebagian kecil komoditas perkebunan yang dijajakan merupakan produk dari kebun masyarakat sendiri, Namun sebagian besar masih didatangkan dari daerah lain, sepermerhasil perkebunan yang dijual lebih banyak berasal dari daerah lain, seperti dari provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat.

Data diatas menjelaskan bahwa masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani kurang berdaya dan kurang optimal dalam mengelola potensi wilayahnya sendiri, yang subur dan menyimpan potensi yang besar untuk menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.

¹² Potensi Pasar Pekon Kampung Baru, *Observasi*, pada Tanggal 16 April 2015

Mereka tidak menyadari bahwa mereka menjadi penonton bahkan menjadi konsumen.

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang dikemas dalam proyek-proyek pemberdayaan yang selama ini diimplementasikan oleh pemerintah dalam bentuk PNPM Mandiri, dan berbagai kemasan sebelumnya belum membuahkan hasil yang memadai, proyek-proyek itu lebih banyak diorientasikan untuk perwujudan sarana fisik dan kurang menyentuh pada upaya perwujudan kemandirian masyarakat lokal dalam melakukan perubahan kondisi kehidupan yang mereka alami secara berkelanjutan. Potensi-potensi lokal yang ada nampak belum disadari oleh masyarakat sendiri sehingga belum bisa dioptimalkan dalam mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menggali dan memetakan potensi masyarakat Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Tanggamus, sehingga tumbuh kesadaran pada masyarakat tentang potensi wilayahnya yang bisa dikelola dengan kreatifitas mereka sendiri.

B. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masyarakat desa adalah masyarakat yang secara administrasi berada dalam wilayah kecamatan dari kabupaten dan provinsi. Secara umum, wilayah pedesaan kekurangan akan sumber daya

manusia yang berkualitas, karena tingkat pendidikan yang rendah atau akibat dari terjadinya urbanisasi usia produktif ke daerah perkotaan. Atau, karena pengaruh budaya masyarakat yang kurang proaktif dan peduli terhadap lingkungannya sendiri, sehingga banyaknya potensi, baik potensi lingkungan, ekonomi dan sosial tidak disadari dan luput dari perhatiannya. Untuk itu, perlu adanya upaya menggali potensi sumberdaya yang yang dapat diberdayakan pada wilayah desa. Juga, perlu ada sumber daya manusia yang mampu pengelolaan sumberdaya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tentang sumberdaya lokal dalam pemberdayaan masyarakat desa (studi tentang pemetaan sumberdaya pembangunan desa dan untuk mengetahui system pengelolaan sumberdaya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa.

C. Kontribusi Penulisan

tulisan tentang Sumber Daya Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Tentang Pemetaan Sumber Daya Pembangunan desa ini diharapkan memberikan konstibusi kepada:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan khasanah keilmuan baik teoritis maupun praktis dalam bidang pemberdayaan potensi sumberdaya masyarakat desa dalam pembangunan. Secara teoritis, memberikan sumbangan teoritik

dalam memperkaya teori-teori dalam pemberdayaan potensi lokal sebagai konsep pendekatan perubahan masyarakat. Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran tentang menggali potensi sumberdaya lokal dalam upaya pemetaan potensi lokal berdasarkan skala prioritas pembangunan masyarakat setempat.

2. Masyarakat desa yang terdiri pemerintahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya bagaimana memanfaatkan potensi sumberdaya lokal dalam pembangunan desa.

D. Teori-Teori Dasar dalam Pemberdayaan masyarakat Desa

1. Pemberdayaan masyarakat berbasis sumberdaya lokal

‘Pemberdayaan’ merupakan sebuah terminologi yang semakin mendapatkan tempat dalam perspektif upaya untuk melakukan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara etimologi terma pemberdayaan berakar pada kata ‘daya’ atau kekuatan. Pemberdayaan dengan demikian mengandung arti suatu proses untuk memberikan daya atau kekuatan, kemampuan terhadap individu atau kelompok yang kurang atau tidak memiliki daya, kekuatan ataupun kemampuan. Menurut Slamet sebagaimana dikutip oleh Oos M. Awas bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu

membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri¹³. Istilah mampu disini mengandung makna : berdaya, faham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Namun demikian, konsep pemberdayaan tidak semata-mata terkait dengan peningkatan kapasitas atau kemampuan individu tetapi lebih pada kemampuan individu yang membentuk kapasitas dalam kaitannya dengan kolektifitas masyarakat. Sehingga, keberdayaan masyarakat menurut Gunawan Sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu untuk bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan¹⁴.

Dalam konteks perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata

¹³ Oos M. Awas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 49

¹⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, sebagaimana dikutip oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko S dalam *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013), edisi revisi, h. 26

lain konsep pemberdayaan secara sederhana bisa difahami sebagai upaya memampukan dan memandirikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupannya disegala bidang secara mandiri.

Pemberdayaan sebagai proses perubahan kondisi sosio-ekonomi, harus selalu mengedepankan keswadayaan masyarakat. Pandangan tentang keswadayaan masyarakat dalam hal ini melihat proses pemberdayaan selalu berbasis pada dinamika internal; dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga lebih mengutamakan potensi dan sumber daya yang tersedia dalam masyarakat itu sendiri. Pandangan ini meniscayakan sebuah keyakinan bahwa didalam setiap kelompok masyarakat selalu tersedia *resources* atau sumberdaya yang merupakan potensi dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Potensi yang ada memerlukan sejumlah upaya agar bisa teraktualisasi dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan. Tanpa upaya yang efektif maka potensi yang ada hanya terhenti sebagai potensi tanpa memberikan kontribusi bagi kehidupan yang aktual.

Untuk menjembatani antara potensi, sumber daya dan peluang di satu pihak dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di lain pihak, menurut Soetomo, diperlukan paling tidak tiga hal. *Pertama*, identifikasi

kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan merupakan manifestasi kapasitas masyarakat dalam membandingkan antara realitas kini dan realitas ideal sebagaimana menjadi cita-cita masyarakat. *Kedua*, Identifikasi potensi, sumber daya dan peluang yang juga selalu berkembang. Tanpa kegiatan tersebut, maka potensi dan sumber daya yang ada akan tetap bersifat laten dan tidak teraktualisasi bagi pemenuhan kebutuhan. Identifikasi ini perlu dilakukan sebagai salah satu pengejawantahan dari prinsip pengutamaan potensi dan sumberdaya lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Identifikasi ini harus mampu melihat keseluruhan potensi dan sumber daya yang tersedia baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya sosial. Sumber daya sosial memiliki tingkat signifikansi yang tidak kalah penting dari sumber daya lainnya. Pengembangan masyarakat yang berbasis dinamika internal adalah proses perubahan yang mengandalkan dorongan energi internal dan potensi dan sumber daya yang ada. *Ketiga*, proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Melalui proses belajar sosial dan proses adaptasi dengan lingkungannya, masyarakat akan menemukan

cara dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumber daya yang tersedia.¹⁵

2. Optimalisasi Sumberdaya Lokal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Pengembangan masyarakat dalam berbagai aspek memerlukan berbagai sumberdaya yang menjadi tumpuan dan modal penting dalam mengembangkan kapasitas masyarakat untuk secara mandiri membentuk masa depan diri dan kelompok/komunitasnya. Potensi dan *resource* yang ada tersedia baik dalam wujud sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA), maupun sumberdaya sosial. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat pada tingkatan ideal diperlukan pemanfaatan segala sumberdaya yang ada secara optimal. Potensi dan *resources* yang tersedia harus diaktualisasikan sehingga tidak tertinggal hanya semata sebagai potensi yang mubazir. Sumberdaya utama yang ada dan tersedia, yang bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah sumberdaya alam, sumberdaya manusia (SDM) dan Sumberdaya Sosial.

¹⁵ Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 118-119

a. Potensi Sumberdaya Alam (SDA)

Secara sosio-historis terdapat kenyataan bahwa salah satu cara yang ditempuh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan memanfaatkan sumberdaya alam. Hal itu dilakukan oleh berbagai kelompok manusia sejak peradaban nomaden hingga peradaban modern. Sumberdaya Alam yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan masyarakat adalah sumberdaya alam dalam pengertian yang luas, baik berupa makhluk hidup (tumbuh-tumbuhan, hewan) maupun non-makhluk hidup (barang tambang). Sumberdaya Alam dimaksud tersedia di lingkungan fisik masyarakat baik di daratan, di udara maupun didalam air. Sebagian dari sumber daya alam itu merupakan sumberdaya yang bisa diperbaharui (*renewable resources*) dan sebagian yang lainnya merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*).¹⁶ Varian sumberdaya alam itu meniscayakan adanya pertimbangan kelestarian sumberdaya alam untuk kelangsungan ketersediaannya pada masa-masa mendatang guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rentang waktu yang lebih panjang.

¹⁶ Soetomo, *Pembangunan Masyarakat merangkai sebuah kerangka*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 188

Dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam paling tidak harus mempertimbangkan aspek konservasi dan pencagaran.¹⁷ Pencagaran dimaksudkan sebagai penggunaan sumberdaya alam secara bijaksana untuk mencapai tingkatan kualitas hidup manusia secara optimal. Pemenuhan kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam seyogyanya juga tidak menimbulkan konflik dengan upaya pelestarian sumberdaya alam. Disamping persoalan pelestarian persoalan lain yang seringkali tidak bisa dilepaskan adalah persoalan penguasaan lahan. Pada lapisan masyarakat yang berbeda dapat terjadi ketimpangan pemilikan dan penguasaan sumberdaya alam. Diantara petani ada yang menguasai lahan yang jauh lebih luas dari yang lain, sehingga di kawasan pedesaan sendiri terjadi kesenjangan dalam penguasaan lahan. Bahkan sebagian lahan pertanian potensial yang ada di desa-desa hak penguasaannya telah berpindah ke orang kota yang note-bene bukan petani sehingga petani desa dalam banyak kasus berubah status menjadi buruh tani di desa mereka sendiri.

b. Potensi sumberdaya Manusia (SDM).

¹⁷ *Ibid.*, h. 191.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu potensi pembangunan yang berasal dari unsur manusia dengan berbagai aktifitasnya. Dalam tinjauan yang lebih bersifat ekonomis, Sumberdaya Manusia dimaksudkan sebagai semua kegiatan manusia yang produktif dan semua potensinya untuk memberikan sumbangan yang produktif kepada masyarakat.¹⁸

Dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sumberdaya manusia tidak hanya dilihat peranannya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek non-ekonomi¹⁹. Jika dilihat dari sisi ekonomi yang sempit, Sumberdaya manusia hanya semata-mata dilihat dan diposisikan sebagai faktor produksi, sehingga diperlakukan sebagai objek (material). Padahal dalam perspektif perubahan faktor manusia merupakan faktor yang utama, sehingga sejatinya manusia merupakan subjek pembangunan. Kontribusi dan peranan yang dimainkannya tidak hanya ditentukan oleh faktor kuantitas, tetapi juga oleh kualitasnya baik sebagai objek maupun subjek pembangunan.

Dalam pendekatan pemberdayaan Masyarakat, proses perubahan yang terjadi sejauh mungkin bersandar pada

¹⁸ Soeroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 1983), h. 4

¹⁹ Soetomo, *op., cit.*, h. 193

kemampuan, prakarsa dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, potensi sumberdaya manusia tidak semata-mata terletak pada kemungkinannya sebagai potensi yang dapat digerakkan proses pengembangan masyarakat, melainkan terutama pada kedudukannya sebagai pelaku pembangunan/pengembangan masyarakat itu sendiri.²⁰ Oleh karena itu dalam perspektif pengembangan masyarakat Sumberdaya Manusia tidak saja diperlakukan sebagai sumberdaya dalam perspektif ekonomi, tetapi juga dalam perspektif sosial-budaya. Dari sudut sosial budaya sumberdaya manusia merupakan pelaku pembangunan dalam kapasitasnya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kapasitasnya untuk memproduksi, pemerataan, pemberian kekuatan dan wewenang, kelangsungan untuk berkembang dan kesadaran akan interdependensi.²¹ Dengan demikian identifikasi atau pemetaan potensi sumberdaya manusia (SDM) dalam suatu kelompok masyarakat perlu

²⁰ *Ibid*, h. 194

²¹ Sofyan Effendi dkk., *Membangun Martabat Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 343

memperhatikan aspek-aspek kuantitas, kualitas dan kemampuan aktualisasi diri serta partisipasi.

Identifikasi sumberdaya manusia penting dilakukan, karena dengan demikian akan dapat diketahui potensi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan. Identifikasi aspek kuantitas dipandang perlu, karena jumlah yang besar akan menjadi kekuatan yang besar juga. Demikian juga identifikasi dan pemetaan kualitas SDM juga tidak kalah pentingnya karena kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya sangat dipengaruhi oleh kualitas Sumberdaya manusia yang mereka miliki. Realitas empiris memberikan penjelasan kebenaran hal ini.

c. Sumberdaya Sosial

Dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih mementingkan unsur manusia dan masyarakatnya, manusia tidak semata diposisikan sebagai proses produksi, tetapi juga menyangkut proses sosio-kultural. Dinamika masyarakat merupakan sumberdaya sosial budaya.²² Dengan menggunakan perspektif historis, dapat diketengahkan tiga unsur sumberdaya sosial budaya di pedesaan; yaitu kepemimpinan, ideologi dan kelembagaan.

²² Sartono Kartodiharjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1987), h. 148

Tokoh-tokoh Pemimpin di desa termasuk golongan elit pedesaan dan kelas sosial yang berada. Otoritasnya bersumber pada kewibawaan pribadi yang pada hakikatnya berdasarkan kharisma yang mereka miliki. Berdasarkan otoritas itu mereka dapat mengendalikan loyalitas pengikut sehingga bisa dimobilisasi untuk tujuan tertentu.

Sementara itu, ideologi yang diperlukan adalah ideologi yang diperlukan untuk membangkitkan kesadaran membangun.²³ Ideologi pembangunan adalah paham yang mencakup berbagai prinsip pedoman perubahan yang menjadi tuntutan essensial bagi keberhasilan pembangunan itu sendiri. Prinsip-prinsip dimaksud diantaranya; 1. Prinsip partisipasi yang lestari berdasarkan kesadaran dan aktivitas. 2. Perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan, 3. Perubahan struktural dalam hal ini dari komunal ke asosiasional 4. Orientasi pada hasil kerja dan tidak pada status.

Sebagai suatu yang sudah terpola dan mengakar dalam masyarakat, sumberdaya sosial itu pada umumnya juga berasal dari unsur-unsur budaya masyarakat. Sebagai salah satu bentuk sumberdaya kebudayaan merupakan media yang memungkinkan pembangunan dapat berjalan dengan sukses, hal ini dimungkinkan karena; *Pertama*, unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisional dimata orang-orang yang

²³ *Ibid*, h. 161

menjadi sasaran program pembangunan. *Kedua*, unsur-unsur budaya secara simbolis merupakan bentuk komunikasi paling berharga dari penduduk setempat. *Ketiga*, Unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi (baik yang berwujud maupun yang terpendam) yang sering menjadikannya sebagai sarana yang paling berguna untuk perubahan.²⁴

3. Pemetaan sumberdaya pembangunan masyarakat

Pemetaan Masyarakat (*social mapping*) bisa diartikan sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematis serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk didalamnya profile dan masalah sosial yang ada pada masyarakat²⁵. Merujuk pada Netting, Kettner dan McMurtry (1993), Pemetaan Masyarakat disebut juga sebagai *social profiling* atau pembuatan profile sebuah masyarakat.

Dalam proses Pemberdayaan Masyarakat, pemetaan sangat urgen untuk dilakukan guna memasok data dan informasi tentang masyarakat yang akan menjadi sasaran program pemberdayaan. Peta yang dihasilkan akan memberikan penjelasan tentang masyarakat sasaran, termasuk gambaran dari persoalan empiris yang dihadapi. Jika program pemberdayaan

²⁴ Nat J Colleta dan Umar Kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan*, (Jakarta; Yayasan Obor, 1985), h. 5

²⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2010), h. 81

masyarakat diposisikan sebagai upaya untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, maka profile masyarakat itu bisa memasok data untuk mendefinisikan masalah masyarakat secara akurat, yang kemudian dicarikan solusinya melalui kegiatan pemberdayaan.

Urgensi dari peta potensi pembangunan yang ada pada sebuah masyarakat bisa dipahami dari data data yang dihasilkan dalam sebuah kegiatan pemetaan. Pemetaan masyarakat/potensi masyarakat pada umumnya memuat data-data pokok disamping memberikan penggambaran tentang potensi fisik/material yang ada pada masyarakat juga memberikan penjelasan tentang potensi sosial antara lain : *Pertama*, Data Demografi yang mencakup jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, gender, mata pencaharian, agama, pendidikan, dll. *Kedua*, Data Geografi yang mencakup topografi, letak lokasi ditinjau dari aspek geografis, aksesibilitas lokasi, pengaruh lingkungan geografis terhadap kondisi sosial masyarakat, dll. Dan *ketiga* data psikografi : nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, mitos, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, karakteristik masyarakat, pola hubungan sosial yang ada, motif yang menggerakkan tindakan masyarakat, pengalaman-pengalaman masyarakat terutama terkait dengan mitigasi bencana, pandangan, sikap, dan perilaku terhadap intervensi luar, kekuatan sosial yang paling berpengaruh, dll serta *keempat* mencakup

Pola komunikasi : media yang dikenal dan digunakan, bahasa, kemampuan baca tulis, orang yang dipercaya, informasi yang biasa dicari, tempat memperoleh informasi

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terus- menerus untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dari suatu keadaan yang belum baik menjadi baik atau memperbaiki keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik. Keadaan yang baik atau lebih baik tersebut menjadi indikator peningkatan kualitas hidup atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud keberhasilan pembangunan.

Dengan demikian pembangunan merupakan suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat baik secara kelompok maupun individu di dalamnya berdasarkan keinginan masyarakat yang melaksanakannya.²⁶ Hal ini sejalan dengan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yang berbunyi:

‘...melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

²⁶ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *op., cit.*, h. 3

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Berdasarkan makna pembangunan dan rumusan UUD'45 di atas, seyogyanya masyarakat Indonesia tidak lagi dalam keadaan keterbelakangan dan kemiskinan. Tetapi, realitas menunjukkan bahwa keadaan masyarakat, khususnya masyarakat desa masih dalam keadaan keterbelakangan, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan maupun dalam bidang kebebasan berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini disebabkan oleh orientasi pembangunan yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan *top down*. Orientasi dan pendekatan tersebut menyebabkan ketergantungan, pasif, dan terbelenggunya partisipasi masyarakat.

Kelemahan paradigma pembangunan dimasa lalu, mendorong para pemikir, pemerhati, dan konseptor pembangunan melakukan perubahan paradigma atau konsep pembangunan kepada paradigma pembangunan berbasis masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Kemandirian lebih menekankan partisipasi. Melalui partisipasi berdasarkan kemampuan dan perjuangan mandiri akan

mampu membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif yang kuat.²⁷

Konsep kemandirian partisipatif adalah suatu konsep yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan, mulai dari proses merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangun sampai pada pemanfaat hasil sesuai dengan kemampuan sumberdaya lokal yang mereka miliki. Oleh karena itu, Sumadyo yang dikutip oleh Torok Mardikanto dkk., merumuskan Tri Bina (Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan)²⁸ dalam kegiatan pemberdayaan:

Pertama, pemberdayaan sumber daya manusia (Bina Manusia). Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat suatu upaya memperkuat daya (kemampuan dan posisi tawar) agar masyarakat semakin mandiri. karena itu, pemberdayaan merupakan proses penguatan kapasitas atau penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu, kelembagaan, maupun sistem atau jejaring antar individu dan kelompok untuk melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas dalam proses dilakukan melalui proses pendidikan dan belajar yang dilakukan

²⁷ Aprillia Theresia dkk., *op., cit.*, h. 23

²⁸ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *op., cit.*, h. 113

secara perlahan, sehingga tumbuh ketergantungan terhadap proses belajar yang telah dilakukan.²⁹

Kedua, pemberdayaan sumber daya alam. Pemberdayaan sumber daya alam merupakan bagian dari bina lingkungan sekaligus bina usaha. Sumber daya alam hanya terbatas pada pemberdayaan fisik sedangkan lingkungan melingkupi bidang fisik dan sosial. Yang terpenting dalam hal ini adalah pemberdayaan sumber daya manusia tidak akan berarti bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mendatangkan manfaat. Sehingga, sumber daya manusia harus mampu memberdayakan potensi lingkungannya, baik potensi alam dalam pengertian fisik maupun sosial dalam bentuk usaha-usaha produktif.

Ketiga, pemberdayaan kebudayaan. Kebudayaan yang dimaknai sebagai hasil karsa, cipta, dan karya masyarakat merupakan bukti bahwa manusia bersifat dinamis, selalu berubah dan berkembang. Perubahan dan perkembangan dalam bidang pengetahuan, seni, dan teknologi sesuai dengan kapasitas atau kemampuan dan sumberdaya yang tersedia pada lingkungannya. Oleh sebab itu, kebudayaan dianggap bukan hanya sebagai wujud kreatifitas tetapi menurut Sedarmayanti, kebudayaan sebagai alat

²⁹ *Ibid.*, h. 67-69

perjuangan mendapatkan pengakuan kesetaraan dalam pergaulan sekaligus sebagai jati diri yang membedakan.³⁰

Ditinjau dari segi hasil, kebudayaan merupakan buah karya atau budi manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sementara itu, ditinjau dari proses, kebudayaan menjadi acuan dalam mempermudah manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara memajukan kepribadian, kecerdasan, kreatifitas, dan keterampilan manusia untuk menghasilkan karya yang lebih baik.

Dewasa ini, karya-karya masyarakat sebagai produk kebudayaan dipadukan dengan pengembangan pariwisata, sehingga kebudayaan dapat dilestarikan, bernilai seni, dan bernilai ekonomis. Oleh karena itu, pemberdayaan kebudayaan harus dilaksanakan oleh masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut sehingga perbedaan sebagai ciri khas suatu masyarakat tetap menjadi daya tarik yang berbeda dengan masyarakat lainnya.³¹ Intinya pembangunan pariwisata memiliki daya tawar yang tinggi apabila dipadukan dengan pembangunan bidang-bidang yang lain termasuk kebudayaan secara komprehensif.

Dengan demikian, pemetaan sumber daya lokal dalam pemberdayaan masyarakat desa harus diawali dari pemetaan sumber

³⁰ Sudarmayanti, *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 13

³¹ *Ibid.*, h. 16-17

daya manusia dan diiringi dengan pemetaan sumber daya lingkungan, dan kebudayaan masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Perpaduan antara ketiganya diharapkan akan menumbuhkan aspirasi dan kreasi masyarakat dalam menentukan program prioritas dalam pembangunan berbasis potensi lokal.

F. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukan penelitian. Menemukan permasalahan dan merumuskannya dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. Juga, ditulis tentang tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori dan kerangka teori, yakni mengkonstruksi teori-teori yang menjadi landasan untuk memahami makna pemberdayaan masyarakat desa dan potensi sumber daya lokal. Bab ini berguna sebagai titik tolak dalam merumuskan teori bab II, mengumpulkan dan menganalisa data pada bab IV, serta dasar dalam merumuskan kesimpulan pada bab V.

Bab II. Pada bab ini penulis menguraikan secara sistimatis dan lebih lengkap tentang teori-teori potensi sumber daya lokal, seperti makna, macam-macam sumber daya lokal dan kemungkinan-kemungkinan dilakukan pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat.

Bab III. Metode Penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan tentang metode penelitian sebagai rumusan atau landasan dalam penetapan jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, serta penetapan populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan analisa data. Ketepatan dalam merumuskan metode penelitian merupakan landasan validitas data yang dihimpun.

Bab IV, merupakan bagian yang berisi tentang diskripsi data-data yang dihimpun berdasarkan hasil interview, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, dilakukan analisis data dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab II, terutama tentang tingkat keberdayaan dan potensi sumberdaya masyarakat.

Bab V, Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari masalah-masalah yang telah dirumuskan pada bab I. dan saran merupakan sumbangan pemikiran yang didasarkan pada kelemahan dan kekurangan atas keadaan obyek penelitian.

BAB II

OPTIMALISASI PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal

1. Perspektif dan Ruang Lingkup Pemberdayaan

‘Pemberdayaan’ merupakan sebuah terminologi yang semakin mendapatkan tempat dalam perspektif upaya untuk melakukan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara etimologi terma pemberdayaan berakar pada kata ‘daya’ atau kekuatan. Pemberdayaan dengan demikian mengandung arti suatu proses untuk memberikan daya atau kekuatan, kemampuan terhadap individu atau kelompok yang kurang atau tidak memiliki daya, kekuatan ataupun kemampuan. Menurut Slamet sebagaimana dikutip oleh Oos M. Awas bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.¹ Istilah mampu disini mengandung makna : berdaya, faham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

¹ Oos M. Awas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 49

Sementara itu, menurut Dharmawan sebagaimana dikutip oleh Aprillia Theresia dkk mendefinisikan pemberdayaan sebagai “*a process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, and to more easily acces to a source of better living*”.² Karena itu, Swift dan Levin menyimpulkan, bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk : *pertama*, memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan *kedua*, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.

Disisi lain, pemberdayaan juga dapat diartkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh indifidu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber-sumber yang terkait dengan pekerjaannya, aktifitas sosialnya dan lain-lain.

² Aprillia Theresia, dkk. *Pembangunan berbasis Masyarakat*, (Bandung; CV Alfabeta, 2014), h. 116

Dari beberapa penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan memiliki dua sisi : *pertama*, sisi politik dimana pemberdayaan difahami sebagai perwujudan kemampuan masyarakat untuk mampu dan berani menyuarkan pendapat, ide dan gagasan-gagasannya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhannya dihadapan pemerintah atau penguasa politik. Pemberdayaan dalam dimensi ini dilakuan dengan memberikan ruang kekuasaan kepada masyarakat. Ruang kekuasaan bagi satu pihak hanya bisa diperoleh dengan mengurangi luasnya ruang kekuasaan pihak lain. Dan kedua berupa dimensi sosial ekonomi dimana pemberdayaan dapat diartikan sebagai perwujudan kemampuan dan kemandirian mereka dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi mereka. Pemberdayaan dengan demikian terkait erat dengan upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri dan potensi-potensi yang mereka miliki, terlepas dari berbagai halangan dan kendala termasuk kendala sosial maupun kendala politik.

Namun demikian, konsep pemberdayaan tidak semata-mata terkait dengan peningkatan kapasitas atau kemampuan indifidu tetapi lebih pada kemampuan indifidu yang membentuk kapasitas dalam kaitannya dengan kolektifitas masyarakat. Sehingga keberdayaan masyarakat menurut Gunawan Sumodiningrat, diartikan sebagai kemampuan indifidu untuk

bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.³

Dalam konteks perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, konsep pemberdayaan secara sederhana bisa difahami sebagai upaya memampukan dan memandirikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupannya disegala bidang secara mandiri.

2. Prinsip-Prinsip dan Tahapan Pemberdayaan

Dalam perspektif pemberdayaan, yang berkaitan dengan masyarakat desa (yang note bene masyarakat petani), maka menurut Soedianto (2001) sebagaimana dikutip Oleh Mardikanto,⁴ terdapat beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagaimana berikut :

1. Kesukarelaan, artinya keterlibatan seseorang dalam pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena paksaan,

³Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, sebagaimana dikutip oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko S dalam *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013), edisi revisi, h. 26

⁴ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 108

melainkan harus dilandaskan atas kesadaran diri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.

2. Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan setiap individu, kelompok maupun lembaga.
3. Keswadayaan, yaitu kemampuan untuk merumuskan dan melakukan kegiatan dengan penuh tanggung jawab tanpa menunggu dan mengharapkan dukungan dari pihak luar.
4. Partisipatif, yaitu keterlibatan semua *stakeholders* sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pemanfaatan hasil kegiatan.
5. Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan yang setara.
6. Demokrasi, yang memberkan hal kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan antara sesama *stakeholder*.
7. Keterbukaan dan kebersamaan, yang dilandasi kejujuran dan saling percaya, saling berbagi rasa dan saling membantu serta mengembangkan sinergisme.

Karena itu pemberdayaan paling tidak harus melalui tahapan-tahapan. Menurut Wilson terdiri dari :

Pemberdayaan dalam proses merupakan suatu siklus kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Oleh karena itu, kegiatan dan gerakan pemberdayaan tidak akan mencapai hasil yang optimal tanpa dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan sistematis. Menurut Tim Delivery yang dikutip oleh Totok Mardikanto, menyebutkan 4 (empat) tahapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni: (a) tahap seleksi lokasi/wilayah; (b) tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat; (c) proses pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan: (1) kajian keadaan pedesaan partisipatif; (2) pengembangan kelompok; (3) penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan; (4) monitoring dan evaluasi partisipatif. (d) tahap pemandirian masyarakat.⁵

Menurut Mardikanto, Seleksi lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan. Sosialisasi merupakan upaya memberikan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan dialog dengan berbagai pihak. Dan, akan menentukan minat dan ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Pemandirian

⁵ *Ibid.*, h. 125

masyarakat merupakan tahap akhir proses pemberdayaan. Oleh karena itu, dalam proses pemandirian masyarakat yang melibatkan potensi internal (sumber daya lokal) dan potensi eksternal yang diposisikan sebagai pendamping/fasilitator harus memosisikan potensi internal sebagai pelaku utama. Dengan demikian, lambat laun faktor internal harus secara lambat laun mengurangi intensitasnya dalam pendampingan.⁶

Tahap proses pemberdayaan, masyarakat secara bersama-sama melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Proses ini meliputi: persiapan masyarakat dan pihak terkait untuk melakukan pertemuan awal, persiapan penyelenggaraan pertemuan, kajian dan penilaian keadaan, dan pembahasan hal dan penyusunan rencana tindak lanjut; (b) menyusun kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian, meliputi: memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah, identifikasi alternative pemecahan masalah, identifikasi sumberdaya yang tersedia, pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya; (c) menerapkan rencana kegiatan kelompok yang didampingi para pendamping dan fasilitator; (d) memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif.⁷

⁶ *Ibid.*, h. 125-127

⁷ *Ibid.*, h. 126

Sejalan dengan pendapat Totok Mardikanto, Wilson dalam Sumaryadi, proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari kegiatan: (a) menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki diri; (b) menumbuhkan kemaunan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan hambatan-hambatan sehingga mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan; (c) mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan; (d) peningkatan peran atau partisipasi; (e) meningkatkan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan; (f) peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan; (g) peningkatan kompetensi.⁸

3. Pemberdayaan Berbasis Lokalitas

Pemberdayaan sebagai proses perubahan kondisi sosio-ekonomi harus selalu mengedepankan keswadayaan masyarakat. Pandangan tentang keswadayaan masyarakat, dalam hal ini melihat proses pemberdayaan selalu berbasis pada dinamika internal; dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga lebih mengutamakan potensi dan sumberdaya yang tersedia dalam masyarakat itu sendiri. Pandangan ini meniscayakan sebuah keyakinan bahwa didalam setiap kelompok masyarakat selalu tersedia *resources* atau sumberdaya yang merupakan potensi

⁸ Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2004)

dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Potensi yang ada memerlukan sejumlah upaya agar bisa teraktualisasi dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan. Tanpa upaya yang efektif, maka potensi yang ada hanya terhenti sebagai potensi tanpa memberikan kontribusi bagi kehidupan yang aktual.

Untuk menjembatani antara potensi, sumberdaya dan peluang di satu pihak dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di lain pihak, menurut Soetomo, diperlukan paling tidak tiga hal.

Pertama, identifikasi kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan merupakan manifestasi kapasitas masyarakat dalam membandingkan antara realitas kini dan realitas ideal sebagaimana menjadi cita-cita masyarakat.

Kedua, Identifikasi potensi, sumberdaya dan peluang yang juga selalu berkembang. Tanpa adanya kegiatan tersebut, maka potensi dan sumberdaya yang ada akan tetap bersifat laten dan tidak teraktualisasi bagi pemenuhan kebutuhan. Kegiatan identifikasi, perlu dilakukan sebagai salah satu pengejawantahan dari prinsip pengutamaan potensi dan sumberdaya lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Identifikasi ini, diperlukan untuk

melihat keseluruhan potensi dan sumberdaya yang tersedia, baik berupa sumberdaya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya sosial. Sumberdaya sosial memiliki tingkat signifikansi yang tidak kalah penting dari sumberdaya lainnya. Pengembangan masyarakat yang berbasis dinamika internal adalah proses perubahan yang mengandalkan dorongan energi internal dan potensi dan sumberdaya yang ada.

Ketiga, proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. Melalui proses belajar sosial dan proses adaptasi dengan lingkungannya, masyarakat akan menemukan cara dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumberdaya yang tersedia⁹

B. Optimalisasi Sumber Daya Lokal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Pengembangan masyarakat dalam berbagai aspek memerlukan berbagai sumber daya yang menjadi tumpuan dan modal penting dalam mengembangkan kapasitas masyarakat untuk secara mandiri membentuk masa depan diri dan kelompok/komunitasnya. Potensi dan *resource* yang tersedia, baik dalam wujud sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA), maupun sumberdaya sosial. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat pada tingkatan

⁹ Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 118-119

ideal, diperlukan pemanfaatan segala sumberdaya yang ada secara optimal. Potensi dan *resources* yang tersedia harus diaktualisasikan, sehingga tidak tertinggal hanya semata sebagai potensi yang mubazir. Sumberdaya utama yang ada dan tersedia, yang bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sumber Daya Sosial.

1. Potensi Sumberdaya Alam (SDA)

Secara sosio-historis terdapat kenyataan bahwa salah satu cara yang ditempuh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan memanfaatkan sumberdaya alam. Hal itu dilakukan oleh berbagai kelompok manusia sejak peradaban nomaden hingga peradaban modern. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan masyarakat adalah sumber daya alam dalam pengertian yang luas, baik berupa makhluk hidup (tumbuh-tumbuhan, hewan) maupun non-makhluk hidup (barang tambang). Sumber daya alam dimaksud, tersedia di lingkungan fisik masyarakat baik di daratan, di udara maupun didalam air. Sebagian dari sumber daya alam itu merupakan sumber daya yang bisa diperbaharui (*renewable resources*) dan sebagian yang lainnya merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*).¹⁰Varian sumber daya alam itu, meniscayakan

¹⁰ Soetomo, *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm 188

adanya pertimbangan kelestarian sumber daya alam untuk kelangsungan ketersediaannya pada masa-masa mendatang, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rentang waktu yang lebih panjang.

Dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, paling tidak harus mempertimbangkan aspek konservasi dan pencagaran.¹¹ Pencagaran dimaksudkan sebagai penggunaan sumber daya alam secara bijaksana untuk mencapai tingkatan kualitas hidup manusia secara optimal. Pemenuhan kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, seyogyanya juga tidak menimbulkan konflik dengan upaya pelestarian sumber daya alam. Disamping persoalan pelestarian persoalan lain yang seringkali tidak bisa dilepaskan adalah persoalan penguasaan lahan. Pada lapisan masyarakat yang berbeda dapat terjadi ketimpangan pemilikan dan penguasaan sumberdaya alam. Diantara petani ada yang menguasai lahan yang jauh lebih luas dari yang lain, sehingga di kawasan pedesaan sendiri terjadi kesenjangan dalam penguasaan lahan. Bahkan sebagian lahan pertanian potensial yang ada di desa-desa hak penguasaannya telah berpindah ke orang kota yang *note-bene* bukan petani sehingga petani desa dalam banyak kasus berubah status menjadi buruh tani di desa mereka sendiri.

¹¹ *Ibid.*, h. 191.

Sumberdaya alam yang ada akan memiliki fungsi optimal dalam mencapai kesejahteraan masyarakat jika dilakukan upaya mengubahnya dari sifat potensial menjadi actual,¹² yang antara lain, dapat dilakukan melalui usaha diversifikasi dan intensifikasi. Diversifikasi merupakan perluasan alternative pemanfaatan sumberdaya alam, sementara intensifikasi merupakan usaha untuk melakukan investasi teknologi yang lebih eksploitatif agar produksi dapat ditingkatkan. Dalam konteks ini memang diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi akan memungkinkan masyarakat untuk melipatgandakan hasil dan produktifitasnya, meningkatkan kemajuannya untuk memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia dan melipatgandakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹³

Dalam hal peningkatan hasil produksi misalnya, Panen padi di awal tahun 2014 Kutai Kartanegara menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, dimana pada panen raya yang dilakukan di Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong dan Desa Teluk Dalam Tenggarong seberang baru-baru ini mampu menghasilkan 5,6 ton per hektare gabah kering panen. Menurut Kabid Produksi dan Pasca Panen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kutai Kartanegara, Suyanto, hasil panen 5,6 ton per hektare itu

¹² *Ibid*, h. 211

¹³ Rustian Kamaluddin, *Beberapa aspek pembangunan Nasional dan Daerah*, (Jakarta:: Ghalia Indonesia, 1983, h. 38

menunjukkan produksi padi berada diatas standar nasional 5,1 ton per hektar. Hasil panen kita di awal tahun ini cukup menggembirakan karena produksinya diatas standar nasional, kata Suyanto. Sekalipun produksi per hektar itu belum maksimal, namun itu sudah menunjukkan keberhasilan dalam penerapan perbaikan pola tanam serta intensifikasi lahan yang dilakukan. Baik melalui pola SLI maupun program kenaikan Indeks Pertanaman (IP).¹⁴

Sebab, Bila ada seseorang yang menanam padi hibrida mendapatkan hasil panen sampai 17 ton/ha dan yang inbrida 12 ton. Jelas hasil tsb adalah luar biasa. Sebab kebanyakan petani di Indonesia, rata-rata mendapatkan hasil panen sebesar 5-6 ton/ha.¹⁵

Sedangkan tanaman kakao, dapat ditingkatkan tidak sekedar menyiapkan bibit, menanam, merawat, dan memetik buahnya. Namun, diperlukan percobaan yang berkelanjutan. Bila berhasil, maka keuntungannya cukup menggembirakan. Walaupun, hanya memanfaatkan teknologi sederhana. Murah, meriah, ramah lingkungan, tapi berpeluang meningkatkan pendapatan berlipat-ganda. Suprapno, petani Desa Sungai Langka Kecamatan Gedung Tatan, Lampung Selatan membuktikannya. Dia tak perlu merogoh kantong terlalu banyak, untuk merawat 8 hektare kebun kakaonya.

¹⁴ <http://news.kutakartanegarab.go.id/produksi-perhektar-padi-kukar-diatas-standar-nasional/>, diunduh, pada Tanggal 31 Oktober 2015

¹⁵ <https://ceritanurmanadi.wordpress.com/2013/05/22/panen-padi-17-tonha/>, diunduh, pada tanggal 31 Oktober 2015

Dengan biaya produksi hampir 0% untuk perawatan, dia bisa memproduksi buah kakao 300 hingga 400 buah per tanaman. Setiap tahunnya dia mendapatkan 20 ton biji basah per hektare atau 1,7 ton biji basah per bulan. Bila harga kakao basah minimal Rp5.000 per kg, maka setiap bulannya Suprapno mendapatkan penghasilan Rp8,5 juta per hektar. Padahal, teknologi yang digunakannya cukup sederhana. Kunci kesuksesan Suprapno hanya pada semut hitam, pupuk biomikro, dan teknik stek tunas. Dia tak perlu membeli pupuk Urea, TSP, atau KCl dari pabrik, pestisida, dan bibit-bibit unggul kakao yang mahal harganya. Justru dengan cara itu Suprapno bisa menekan biaya produksi.¹⁶

Untuk budidaya pisang, yang menduduki tempat pertama diantara jenis buah-buahan lainnya, baik dari sisi sebaran, luas pertanaman, maupun dari sisi produksinya. Namun demikian, secara umum produktivitas pisang yang dikembangkan masyarakat masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 10-15 ton/ha. Padahal, potensi produktivitasnya bisa mencapai 35-40 ton/ha. Kesenjangan produktivitas tersebut terutama disebabkan karena teknik budidaya yang tidak tepat dan tingginya gangguan hama dan penyakit, terutama oleh serangan dua penyakit paling berbahaya dan mematikan, yaitu layu bakteri atau penyakit darah dan penyakit layu fusarium. Peluang pengembangan agribisnis komoditas pisang masih terbuka luas. Untuk keberhasilan usaha tani pisang, selain penerapan

¹⁶<http://s0t4.blogspot.co.id/2009/10/kencing-semut-hitam-dongkrak-produksi.html>, html, diunduh pada Tanggal 31 Oktober 2015

teknologi, penggunaan varietas unggul dan perbaikan varietas harus dilaksanakan. Varietas unggul yang dimaksud adalah varietas yang toleran atau tahan terhadap hama dan penyakit penting pisang, mampu berproduksi tinggi, serta mempunyai kualitas buah yang bagus dan disukai masyarakat luas.¹⁷

Selain tiga jenis sumber daya alam di atas, ada juga sumber daya alam sebagai bahan berbagai Industri. Macam-macam industry dalap diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku
Industri ekstraktif

Industri ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar. Contoh : pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.

- 2) Industri nonekstaktif.

Industri nonekstaktif adalah industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar.

- 3) Industri fasilitatif.

Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Contoh :

¹⁷ <https://warasfarm.wordpress.com/2013/05/13/budidaya-pisang-yang-menguntungkan>, diunduh pada Tanggal 31 Oktober 2015

Asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya.

Golongan / macam industri berdasarkan besar kecil modal:

- 1) Industri padat modal adalah industry yang, dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.
- 2) Industri padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

Jenis-jenis / macam industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986:

- 1) Industri kimia dasar, misalnya: contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb
Industri mesin dan logam dasar, seperti: industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dll.
- 2) Industri kecil, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll.
- 3) Aneka industri, seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.

Jenis-jenis / macam industri berdasarkan jumlah tenaga kerja:

- 1) Industri rumah tangga, yakni industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang.
- 2) Industri kecil, yakni industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang.
- 3) Industri sedang atau industri menengah, yakni industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.
- 4) Industri besar, yakni industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih.

Jadi, jenis-jenis industri di Indonesia digolongkan menjadi dua belas kelompok, antara lain:

- 1) Industri pengolahan pangan: Meliputi industri penggilingan padi, pembuatan minyak kelapa sawit dan minyak nabati pembuatan tapioka, pabrik teh, pabrik kopi dan coklat.
- 2) Industri Tekstil: Banyak terdapat di Jawa Barat, Jakarta dan sebagian di Jawa Tengah. Kemajuan industri tekstil sangat pesat setelah ditemukan mesin-mesin modern. Penemuan mesin-mesin ini mengakibatkan industri kecil gulung tikar.
- 3) Industri Barang Kulit: Industri ini menghasilkan tas, koper, sepatu, sandal, ikat pinggang dan sebagainya. Industri ini banyak terdapat di dalam sentra-sentra industri di Jawa. Industri

- pengolahan kulit tidak termasuk dalam kelompok industri barang kulit.
- 4) Industri Pengolahan Kayu: Menghasilkan bahan bangunan dan perabot rumah tangga serta kayu lapis. Hasil industri besar pengolahan kayu banyak di ekspor ke Eropa, Timur Tengah, Jepang dan Amerika.
 - 5) Industri Pengolahan Kertas: Perkembangan industri pengolahan kertas sangat pesat. Umumnya industri pengolah kertas berbentuk industri besar yang menghasilkan barang-barang dari kertas tulis, kertas bungkus dan karton, kertas hias dan tisu. Industri ini terdapat di Pematang Siantar, Padalarang, Banyuwangi, dan Martapura.
 - 6) Industri Kimia Farmasi: Industri kimia dan farmasi menghasilkan zat asam, garam kimia, pupuk, pembasmi serangga, plastik, serat buatan, bahan-bahan kecantikan, cat, pernis, dan obat-obatan. Perkembangan industri ini sangat pesat khususnya terdapat di kota-kota besar.
 - 7) Industri Pengolahan Karet: Industri pengolahan karet terutama menghasilkan ban luar dan ban dalam untuk kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Selain itu, industri ini juga menghasilkan barang-barang seperti mainan anak, keperluan rumah tangga dan perlengkapan mobil dan kapal.

- 8) Industri Bahan Galian Bukan Logam: Menghasilkan semen, gelas dan kaca serta keramik dan asbes. Pabrik semen yang besar terdapat di Padang (Sumatera Barat), Tonasa (Sulawesi Selatan), Gresik (Jawa Timur), Cibinong (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah) dan beberap tempat lainnya. Pabrik pupuk terdapt di Palembang dan Kalimantan Timur.
- 9) Industri Baja/Pengolahan Logam: Industri baja sangat pesat perkembangannya, banyak dibutuhkan untuk industri karoseri mobil dan perusahaan angkutan lainnya. Industri baja yang besar terdapat di Cilegon yang menghasilkan antara lain plat baja, pipa baja, dan kabel-kabel baja. Industri yang tidak begitu besar menghasilkan atap seng, besi, beton, pipa-pipa besi lainnya dan bahkan pisau silet.
- 10) Industri Peralatan: Industri peralatan menghasilkan terutama alat-alat transportasi dan alat berat serta kendaraan lainnya, dalam bentuk: Pesawat terbang yang dihasilkan PT.Dirgantara Indonesia di Bandung, Kapal laut yang dihasilkan PT.PAL di Surabaya, Perakitan mobil dan sepeda motor di Jakarta dan Karawang, Alat-alat elektronik dan perakitannya di Jabodetabek, Alat-alat pertanian dan alat pertukangan di Karawang dan Depok.
- 11) Industri Pertambangan: Umumnya berupa industri besar, misalnya tambang timah, nikel, tembaga dan minyak. Tambang

tembaga yang dikelola PT Freeport di Papua (Irian Jaya) ternyata juga menghasilkan emas dalam jumlah yang cukup banyak.

- 12) Industri Pariwisata: Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan industri pariwisata baik untuk obyek wisata alam maupun budaya.¹⁸

2. Potensi sumberdaya Manusia (SDM).

Sumberdaya manusia merupakan salah satu potensi pembangunan yang berasal dari unsur manusia dengan berbagai aktifitasnya. Dalam tinjauan yang lebih bersifat ekonomis, Sumberdaya Manusia dimaksudkan sebagai semua kegiatan manusia yang produktif dan semua potensinya untuk memberikan sumbangan yang produktif kepada masyarakat.¹⁹

Dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sumberdaya manusia tidak hanya dilihat peranannya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek non-ekonomi.²⁰ Jika dilihat dari sisi ekonomi yang sempit, Sumberdaya manusia hanya semata-mata dilihat dan diposisikan sebagai faktor produksi, sehingga

¹⁸ <http://3rafika.blogspot.co.id/2009/11/kawasan-industri.html>, diunduh pada tanggal 30 Oktober 2015

¹⁹ Soeroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 1983), h. 4

²⁰ Soetomo, *op. cit.*, h. 193

diperlakukan sebagai objek (material). Padahal dalam perspektif perubahan faktor manusia merupakan faktor yang utama, sehingga sejatinya manusia merupakan subjek pembangunan. Kontribusi dan peranan yang dimainkannya tidak hanya ditentukan oleh faktor kuantitas, tetapi juga oleh kualitasnya baik sebagai objek maupun subjek pembangunan.

Dalam pendekatan pemberdayaan Masyarakat, proses perubahan yang terjadi sejauh mungkin bersandar pada kemampuan, prakarsa dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, potensi sumberdaya manusia tidak semata-mata terletak pada kemungkinannya sebagai potensi yang dapat digerakkan proses pengembangan masyarakat, melainkan terutama pada kedudukannya sebagai pelaku pembangunan/pengembangan masyarakat itu sendiri.²¹ Oleh karena itu, dalam perspektif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sumber daya manusia tidak saja diperlakukan sebagai sumber daya dalam perspektif ekonomi, tetapi juga dalam perspektif sosial-budaya. Dari sudut sosial budaya, sumber daya manusia merupakan pelaku pembangunan dalam kapasitasnya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kapasitasnya untuk berproduksi, pemerataan, pemberian kekuatan dan wewenang, kelangsungan untuk berkembang dan kesadaran akan interdependensi.²² Dengan demikian, identifikasi atau

²¹ *Ibid*, h. 194

²² Sofyan Effendi dkk., *Membangun Martabat Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 343

pemetaan potensi sumberdaya manusia (SDM) dalam suatu kelompok masyarakat perlu memperhatikan aspek-aspek kuantitas, kualitas dan kemampuan aktualisasi diri serta partisipasi.

Identifikasi sumber daya manusia penting dilakukan, sehingga akan dapat diketahui potensi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan. Identifikasi aspek kuantitas dipandang perlu, karena jumlah yang besar akan menjadi kekuatan yang besar juga. Demikian juga identifikasi dan pemetaan kualitas SDM juga tidak kalah pentingnya karena kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya sangat dipengaruhi oleh kualitas Sumberdaya manusia yang mereka miliki. Realitas empiris memberikan penjelasan kebenaran hal ini.

Pemanfaatan sumber daya manusia dalam proses pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menyangkut dua hal: *pertama*, Peningkatan dan pengembangan kualitas, *kedua*, pemanfaatannya melalui berbagai peluang, aktifitas dan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Peningkatan dan pengembangan dimaksud untuk menambah potensi dan kemampuan sumberdaya manusia tersebut, sehingga lebih mampu berperan sebagai subjek dan objek pemberdayaan. Peluang dalam bentuk berbagai usaha dan aktifitas dimaksudkan untuk mengubah sumberdaya potensial menjadi actual dan produktif. Kedua hal tersebut berjaln berkelindan membentuk profile sumberdaya manusia yang produktif dan inovatif, yang

menjadi factor produksi yang potensial sekaligus menjadi factor perubahan masyarakat menuju kondisi kehidupan yang lebih baik disegala bidang.Sumberdaya manusia yang berkualitas dengan demikian merupakan sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatifual, yang menjadi sumberdaya utama dalam mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

3. Sumberdaya Sosial

Dibandingkan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sumber daya social sosial memang tidak tampil secara kongkrit. Walaupun demikian, jika mampumengidentifikasi dan memanfaatkannya secara tepat, peranannya bagi keberhasilan pengembangan masyarakat tidak kalah penting.

Dalam pembangunan/pengembangan masyarakat kekuatan utamanya adalah pada masyarakat itu sendiri. Pembangunan masyarakat merupakan pengerahan internal dan pembentukan kembali sumber-sumber kebudayaan yang ada dan bukan penyuntikan unsure-unsur asing yang baku.²³

Dalam hal ini, identifikasi sumber daya sosial menjadi sebuah keniscayaan, mengingat posisi strategis dari sumber daya sosial itu dalam proses pengembangan masyarakat.Unsur-unsur sosial budaya yang mempunyai dasar yang luas, yang dijunjung tinggi dan sudah

²³ Nat J Colleta dan Umar Khayam, *Kebudayaan dan Pembangunan*, (Jakarta : Yayasan Obor, 1987), h. 6

bertahan bertahun-tahun lamanya, seharusnya digunakan sebagai sarana dalam proses pengembangan masyarakat.

Dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih mementingkan unsur manusia dan masyarakatnya, manusia tidak semata diposisikan sebagai proses produksi, tetapi juga menyangkut proses sosio-kultural. Dinamika masyarakat merupakan sumber daya sosial budaya.²⁴ Dengan menggunakan perspektif historis, dapat diketengahkan tiga unsur sumberdaya sosial budaya di pedesaan; yaitu kepemimpinan, ideologi dan kelembagaan.

Tokoh-tokoh Pemimpin di desa termasuk golongan elit pedesaan dan kelas sosial yang berada. Otoritasnya bersumber pada kewibawaan pribadi yang pada hakikatnya berdasarkan kharisma yang mereka miliki. Berdasarkan otoritas itu, mereka dapat mengendalikan loyalitas pengikut sehingga bisa dimobilisasi untuk tujuan tertentu. Walaupun, secara empiris menunjukkan, bahwa kewibawaan pemimpin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mendukung. Pemimpin ideal ditengah masyarakat umumnya dicirikan oleh kemampuannya untuk membawa masyarakat dalam kondisi kehidupan yang sejahtera²⁵.

²⁴ Sartono Kartodiharjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1987), h. 148

²⁵ Masing-masing komunitas memiliki definisi dan konstruksi tersendiri tentang kesejahteraan. Konsep kesejahteraan yang ada dan dianut masyarakat

Sedangkan, ideologi yang diperlukan adalah ideologi yang mampu membangkitkan kesadaran membangun.²⁶ Ideologi pembangunan adalah paham yang mencakup berbagai prinsip pedoman perubahan yang menjadi tuntutan esensial bagi keberhasilan pembangunan itu sendiri. Prinsip-prinsip dimaksud diantaranya; 1. Prinsip partisipasi yang lestari berdasarkan kesadaran dan aktivitas. 2. Perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan, 3. Perubahan struktural dalam hal ini dari komunal ke asosiasional 4. Orientasi pada hasil kerja dan tidak pada status.

Sebagai suatu yang sudah terpolakan dan mengakar dalam masyarakat, sumber daya sosial itu pada umumnya juga berasal dari unsur-unsur budaya masyarakat. Sebagai salah satu bentuk sumberdaya kebudayaan merupakan media yang memungkinkan pembangunan dapat berjalan dengan sukses, hal ini dimungkinkan karena; *Pertama*, unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisional dimata orang-orang yang menjadi sasaran program pembangunan. *Kedua*, unsur-unsur budaya secara simbolis merupakan bentuk komunikasi paling berharga dari penduduk setempat. *Ketiga*, Unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi

tidak terlepas dari nilai-nilai local yang dianut. Rumusan kesejahteraan berdasarkan perspektif local yang banyak didaarkan pada pandangan cultural masyarakat bersangkutan ini oleh Susetiawan disebut sebagai konsep kesejahteraan dalam konstruksi komunitas. Konsep kesejahteraan model konstruksi local ini sangat ditentukan oleh pandangan dan visi berdasarkan kearifan local. Lihat Sup oleh Susetiawan (2011) sebagaimana dikutip oleh Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), h. 19

²⁶ *Ibid*, h. 161

(baik yang berwujud maupun yang terpendam) yang sering menjadikannya sebagai sarana yang paling berguna untuk perubahan.²⁷ Dalam konteks pengembangan masyarakat, Lembaga tradisional umumnya cukup efektif sebagai sarana mengorganisasikan tindakan bersama. Hal ini karena lembaga tradisional kenyataannya masih cukup mengakar dalam masyarakat. Sebuah lembaga masyarakat akan efektif menggerakkan dan memfasilitasi berbagai aktifitas bersama dalam pembangunan jika memenuhi dua persyaratan sebagai berikut; *Pertama*, Cukup mengakar dalam masyarakat dan *kedua*, tanggap terhadap berbagai tuntutan perubahan dan pembaruan.²⁸

C. Pemetaan sumberdaya pembangunan masyarakat

Pemetaan Masyarakat (*social mapping*) bisa diartikan sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematis serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk didalamnya profile dan masalah sosial yang ada pada masyarakat.²⁹ Merujuk pada Netting, Kettner dan McMurtry (1993), Pemetaan

²⁷ Nat J Colleta dan Umar Kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan*, (Jakarta; Yayasan Obor, 1985), h. 5

²⁸ Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 6

²⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2010), h. 81

Masyarakat disebut juga sebagai *social profiling* atau pembuatan profil sebuah masyarakat.

Dalam proses Pemberdayaan Masyarakat, pemetaan sangat urgen untuk dilakukan guna memasok data dan informasi tentang masyarakat yang akan menjadi sasaran program pemberdayaan. Peta yang dihasilkan akan memberikan penjelasan tentang masyarakat sasaran, termasuk gambaran dari persoalan empiris yang dihadapi. Jika program pemberdayaan masyarakat diposisikan sebagai upaya untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, maka profile masyarakat itu bisa memasok data untuk mendefinisikan masalah masyarakat secara akurat, yang kemudian dicarikan solusinya melalui kegiatan pemberdayaan.

Urgensi dari peta potensi pembangunan yang ada pada sebuah masyarakat bisa dipahami dari data data yang dihasilkan dalam sebuah kegiatan pemetaan. Pemetaan masyarakat/potensi masyarakat pada umumnya memuat data-data pokok disamping memberikan penggambaran tentang potensi fisik/material yang ada pada masyarakat juga memberikan penjelasan tentang potensi sosial antara lain : *Pertama*, Data Demografi yang mencakup jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, gender, mata pencaharian, agama, pendidikan, dll. *Kedua*, Data Geografi yang mencakup topografi, letak lokasi ditinjau dari aspek geografis, aksesibilitas lokasi, pengaruh lingkungan

geografis terhadap kondisi sosial masyarakat, dll. Dan *ketiga* data psikografi : nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, mitos, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, karakteristik masyarakat, pola hubungan sosial yang ada, motif yang menggerakkan tindakan masyarakat, pengalaman-pengalaman masyarakat terutama terkait dengan mitigasi bencana, pandangan, sikap, dan perilaku terhadap intervensi luar, kekuatan sosial yang paling berpengaruh, dll serta *keempat* mencakup Pola komunikasi : media yang dikenal dan digunakan, bahasa, kemampuan baca tulis, orang yang dipercaya, informasi yang biasa dicari, tempat memperoleh informasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Permasalahan masyarakat pedesaan adalah kurangnya sumber daya manusia yang sadar akan potensi pengetahuan dan keterampilan serta lingkungannya. Sehingga, sepiantas lalu masyarakat desa dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat miskin atau masyarakat yang syarat dengan keterlekangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dan memahami masalah potensi sumber daya lokal dalam pemberdayaan masyarakat desa di pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Tanggamus.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian tentang keadaan masyarakat sebagai obyek, kondisi lingkungan baik yang bersifat fisik maupun sosial, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayahnya. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa

sebab akibat melalui identifikasi dari penomena-penomena yang ada. Data-data hasil penelitian digunakan untuk melakukan berbagai identifikasi serta analisis terhadap potensi sumber daya masyarakat sebagai obyek penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran tentang peta sumber daya lokal serta keberdayaan masyarakat di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Tanggamus.

B. Populasi dan Sampel

Penelitian tentang pemetaan sumber daya lokal dalam pembangunan masyarakat di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Tanggamus, dilakukan terhadap aparat pemerintahan pekon, Lembaga Pertimbangan Masyarakat Pekon, tokoh masyarakat (tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda) yang berjumlah 20 orang. Dengan demikian, penelitian ini tergolong pada penelitian populasi.

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendiskripsikan seluruh data yang diperoleh melalui berbagai metode. Dalam pengumpulan data yang diperlukan dipergunakan beberapa tehnik utama sebagai berikut :

1. Wawancara Informan Kunci (*Key Informan Interview*).
Wawancara ini terdiri serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap indifidu-indifidu tertentu yang sudah

- diseleksi karna dianggap memiliki pengetahuan dan mengetahui data mengenai subjek yang diteliti. Wawancara ini bersifat kualitatif, mendalam (*indept interview*) dan terstruktur.
2. Diskusi Kelompok Fokus (*Focus Group Discussion*) yang melibatkan kluster masyarakat yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti. Diskusi kelompok terfokus dilakukan dalam beberapa tahapan pada beberapa kelompok masyarakat yang merupakan varian dari masyarakat setempat. Peneliti dalam hal ini mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar terhadap hasil pengamatan peneliti.
 3. Wawancara Kelompok Masyarakat (*Community Group Interview*). Dalam melakukan wawancara ini peneliti dipandu oleh serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada semua anggota kelompok masyarakat dalam sebuah pertemuan terbuka, dengan merujuk pada pedoman wawancara yang telah dibuat.
 4. Pengamatan Langsung (*Direct Observation*), Peneliti dalam hal ini akan berkunjung dan melakukan pengamatan lapangan secara langsung guna mengumpulkan data yang menyangkut kondisi geografis dan topografis, sumber-sumber pembangunan yang tersedia, kondisi dan tingkat keberdayaan masyarakat dan lain-lain.

Disamping beberapa tehnik diatas, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi untuk menggali data-data sekunder, seperti; struktur pemerintahan, visi-misi pemerintahan

kelurahan, keadaan wilayah (luas, geografis, pemanfaatan) dan data penduduk dilihat dari pendidikan, pekerjaan, agama dll.

Adapun data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah:

- a. Kondisi geografis dan demografis yang meliputi kondisi wilayah, demografi penduduk, struktur pemerintahan, visi-misi pemerintahan, dan mata pencaharian penduduk.
- b. Potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial masyarakat yang memungkinkan dilakukan pemberdayaan.
- c. Pandangan atau sikap masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal

D. Metode Analisis Data

Data kualitatif akan diolah secara kualitatif melalui proses *editing*, kategorisasi, deskripsi dan interpretasi, penyimpulan sementara dan kesimpulan akhir. Data yang diolah secara kuantitatif ini akan digunakan untuk mendukung atau memperkuat data-data yang dianalisis dengan menggunakan metode konten analisis.

BAB IV

WILAYAH DESA DAN POTENSI SUMBER DAYA LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Desa/Pekon dalam Pemberdayaan

1. Profil Pekon/Desa pemberdayaan

Pekon Kampung Baru masuk dalam wilayah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Kampung Baru dalam dialeg Lampung biasa disebut “*Kampung Bakhu*” atau pemukiman baru. Menurut tokoh adat, tokoh masyarakat dan yang dituakan (yang ditokohkan) masyarakat setempat, ada dua pendapat tentang asal mula nama Kampung Bakhu, yakni: *pertama*, karena asal mula penduduknya berasal dari pekon (desa) sebelah (Pekon Tanjung Jati, Mulang Maya, dan Wates) yang membentuk pemukiman baru. *Kedua*, sebelum dijadikan pemukiman, tempat ini dipenuhi dengan pohon waru atau “*bakhu*” dalam bahasa Lampung Saibatin.¹

Pada tahun 1930 dengan terbitnya Peraturan Hindia Belanda (*Statsblad*) tentang Pemerintahan Desa/Kampung, maka secara deponitif lahirlah Desa Kampung Baru yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung. Pejabat Kepala pekon atau kepala desa sejak deponitif sebagai pemerintahan desa/kampung sampai sekarang sebagai berikut:

¹ Sa'ud bin M. Syukur, Putra Ketiga Kepala Pekon Pertama, *Wawancara*, pada Hari Minggu, Tanggal 13 September 2015

- 1) M. Syukur Minak Sampurna (Alm) masa jabatan 1930-1965
- 2) Abdul Aziz (Alm) masa jabatan 1965-1979
- 3) Abdul Wahid (Alm) masa jabatan 1980-1986
- 4) Basri , masa jabatan 1986-1988 (PJS)
- 5) Zaini (Alm), masa jabatan 1988-2003
- 6) Abdul Tholib (Alm), masa jabatan 2003-2004
- 7) Bun Yani, masa jabatan 2005-2006 (PJS)
- 8) Amirzah, masa jabatan 2006 sampai sekarang.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 bulan Desember, tentang Otonomi Daerah istilah “Desa” berubah menjadi “*Pekon*”, sehingga Desa Kampung Baru berubah nama menjadi Pekon Kampung Baru.³ Pada saat ini, Pekon Kampung Baru memiliki 2 (dua) Dusun dan 10 Rukun Tetangga (RT), yakni Dusun I yang terdiri dari RT.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10, serta Dusun II yang terdiri dari RT. 8 dan RT. 9.⁴

Secara administratif dan geografis, wilayah Pekon Kampung Baru, berbatasan dengan pekon lain, yakni:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan lindung register 30 dan Pekon Tanjung Jati, Pekon pemekaran dari wilayah Pekon Kampung Baru.

² Monografi Pekon Kampong Baru Tahun 2015, *Dokumentasi*, dicatat pada tanggal 13 September 2015

³ Amirzah, Kepala Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada tanggal 13 September 2013

⁴ Profil Pekon Kampung Baru Tahun 2015, *Dokumentasi*, dicatat pada tanggal 13 September 2015

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Mulang Maya dan Pekon Umbul Buah.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Talang Rejo dan PT. tanggamus Indah.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan hutan lindung register 28.⁵

Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus memiliki 544 KK atau 2.217 jiwa. 485 KK berprofesi sebagai petani dan buruh tani, selebihnya berprofesi sebagai PNS, wiraswasta, pedagang, pertukangan, dan jasa. Berikut profil penduduk Pekon Kampung Baru:

a. Jumlah Penduduk Menurut Usia

NO	USIA	JUMLAH (JIWA)
1.	0 – 1 Tahun	52
2.	1 – 5 Tahun	261
3.	6 - 15 Tahun	665
4.	16 – 55 Tahun	1087
5.	56 Tahun Keatas	152
JUMLAH		2.217

Sumber: Profil Pekon Kampung Baru Tahun 2015,
Dokumentasi, dicatat pada tanggal 13-09-2015

Keadaan penduduk berdasarkan usia di atas, menggambarkan bahwa kurang lebih 49 % (1087 jiwa)

⁵ Profil Pekon Kampung Baru Tahun 2015, *Dokumentasi*, dicatat pada tanggal 13 September 2015

penduduk Pekon Kampung Baru adalah usia produktif atau usia kerja. Sedangkan 51 % adalah usia tidak produktif atau usia yang ditanggung, baik anak-anak maupun orang tua yang sudah berusia lanjut.

b. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN (TAMAT)	JUMLAH (JIWA)
1.	Pra Sekolah	169
2.	SD	650
3.	SMP Sederajat	650
4.	SMA Sederajat	450
5.	Akademi/PT	169
6.	Tidak Tamat	126
JUMLAH		2.217

Sumber: Profil Pekon Kampung Baru Tahun 2015,
Dokumentasi, dicatat pada tanggal 13-09-2015

Data di atas, menggambarkan tentang potensi Sumber Daya Manusia sebagai sumber daya pembangunan. Sumber Daya Manusia potensial yang dapat berperan maksimal dalam pemberdayaan masyarakat desa ini adalah sumber daya berpendidikan SMP Sederajat, SMA sederajat, Akademi, dan Sarjana berjumlah 1.395 orang. Sementara yang lainnya masih berada pada masa anak-anak sehingga baru menjalani pendidikan tingkat dasar, sebagian lainnya juga hanya berpendidikan tingkat dasar dan telah berusia lanjut.

c. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Petani	700 Jiwa
2.	Buruh Tani	350 Jiwa
3.	Pedagang	350 Jiwa
4.	Pertukangan	24 Jiwa
5.	PNS/TNI/POLRI	50 Jiwa
6.	Lainnya	767 Jiwa
		2.217 jiwa

Sumber: Profil Pekon Kampung Baru Tahun 2015,
Dokumentasi, dicatat pada tanggal 13-09-2015

Profil penduduk diatas menggambarkan jenis pekerjaan yang digeluti masyarakat sejalan dengan situasi dan kondisi wilayah perkampungan, yakni sebahagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Sedangkan, profesi sebagai pedagang merupakan penyesuaian pekerjaan sesuai dengan kondisi kekinian, sebagai jalur lintas barat, pariwisata air terjun Way Lalaan, dan pemenuhan kebutuhan penduduk.⁶

d. Profil Prasarana Pekon

Dilihat dari sarana dan prasarana yang ada nampak bahwa desa atau pekon ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai, yang dapat memenuhi kebutuhan

⁶ Nasrudin, Sekretaris Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal, 11 Oktober 2015

masyarakat/penduduk pekon. Dari data yang ada 20 responden menyepakati bahwa Pekon Kampung Baru memiliki prasarana berupa; 1 unit Balai Pekon, 1 km jalan Kabupaten, 3 km jalan Kecamatan, 13 km jalan pekon, 4 masjid dan 3 musholla, 3 sekolah (TK, SD, dan SMK), 10 sumber air bersih, 1 irigasi.⁷

Sarana dan prasarana jalan sebagai sarana utama dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, terbentang sepanjang 17 Km; baik dalam bentuk jalan Kabupaten sepanjang 1Km, jalan kecamatan sepanjang 3 Km serta 13 Km dalam bentuk jalan desa. Jalan desa merupakan sarana yang memudahkan masyarakat untuk mencapai kebun, sawah dan tempat-tempat bekerja masyarakat dalam mencari nafkah. Meskipun kualitas jalan belum begitu baik, namun sudah bisa dilalui kendaraan roda 4 dan minimal roda dua. Keberadaan jalan desa juga memudahkan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian mereka, baik untuk dibawa ke rumah tempat tinggal maupun ke jalan utama untuk diteruskan ke pasar, atau tempat-tempat pedagang pengumpul.

⁷ Damin, Kaur Pembangunan Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

e. Profil Sosial Budaya dan Sosial Keagamaan Pekon Kampung Baru

Pada umumnya, wilayah Kecamatan Kota Agung Timur dihuni oleh sebahagian besar suku Lampung yang juga merupakan masyarakat adat. Walaupun masyarakatnya telah berbaur dengan suku lain, seperti suku Jawa, Sunda dan Padang. Posisi masyarakat suku Lampung yang mayoritas mewarnai budaya dan adat istiadat yang berlaku, terutama berupa bahasa komunikasi dalam pergaulan sehari-hari yang umumnya memakai bahasa Lampung. Adat istiadat dan budaya perkawinan juga masih diwarnai oleh budaya Lampung yang relative kental. Demikian juga pakaian adat, sebagian arsitektur rumah dan lain-lain, yang masih menampakkan ciri budaya Lampung.

Meski terdapat suku atau etnis lain selain Lampung, namun nampak bahwa mereka telah berbaur dan berasimilasi dengan suku Lampung. Dalam beberapa hal suku pendatang lebih mengidentifikasi diri dan keluarganya sebagai orang Lampung dari pada identitas budaya suku asli mereka. Menurut Imron, orang-rang dari suku Jawa, Sunda, dan Padang yang berdomisili di Pekon Kampung Baru sebahagian besar menyatakan keluarga mereka menjadi bagian dan diakui sebagai bagian dari kelompok-kelompok adat yang ada. Dan, mereka mengikuti system kekerabatan

dan segala aturan serta norma-norma yang telah diatur pada masyarakat adat setempat (adat Saibatin).⁸

Dalam konteks sosio-politik lokal, kepemimpinan adat yang didasari oleh nilai-nilai kultural nampak masih berpengaruh. Meskipun terdapat struktur kepemimpinan desa yang formal, namun struktur kepemimpinan desa tidak atau belum bisa melepaskan diri dari struktur kepemimpinan kultural yang bersifat tradisional. Kepemimpinan adat menjadi energy yang menggerakkan aktifitas pembangunan desa. Integrasi social yang menjadi kekuatan social masyarakat dalam membangun desa/pekon ini digerakkan dan dimotivasi oleh kepemimpinan tradisional desa. Menurut Amiruddin HK., disadari atau tidak pengaruh kepemimpinan adat dalam menggerakkan masyarakat termasuk kepemimpinan Pekon (Kepala Pekon dan Aparatnya) menjalankan model kepemimpinan adat. Sehingga, mulai dari pencalonan Kepala Pekon dan pemilihan aparat pekon mempertimbangkan restu dan petunjuk pimpinan adat. Demikian juga dalam melaksanakan program-program pekon harus bekerja sama dengan masyarakat adat.⁹

⁸ Imron, Punyimbang Adat/Ketua Karang Taruna Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

⁹ Amiruddin HK, Punyimbang Adat Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

Nilai-nilai budaya Lampung yang masih mengikat masyarakat desa/pekon ini juga menjadi elan sosial-politik yang menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan masyarakatnya. Perubahan sosial budaya juga banyak terjadi melalui jalur nilai-nilai social politik tradisional yang ada di desa, misalnya; perubahan pemahaman tentang pendidikan, sikap gotong-royong dan kebersamaan, sebagiannya dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisi budaya local. Meski pada sebagian perubahan terjadi lebih karena factor-faktor lain diluar factort dan budaya tradisional.¹⁰

Pada tataran formal 100 persen masyarakat penduduk pekon Kampung Baru menganut agama Islam, meski secara substantif masyarakat desa ini bisa dikategorikan kurang agamis. Aktifitas beragama sehari-hari belum ditopang oleh keberadaan lembaga keagamaan yang memadai. Secara kelembagaan, Pekon Kampung Baru memiliki 6 kelompok majlis ta'lim ibu-ibu dan 1 kelompok majlis taklim bapak-bapak. Suasana keagamaan akan terasa dalam pengajian rutin majlis ta'lim, sholat jum'at, dan hari-hari besar Islam serta acara pernikahan. Budaya menyebarkan salam dan saling bersalaman hanya ada pada acara pengajian dan hari besar

¹⁰ Damin, Kaur Kesra Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

Islam, sementara suasana masjid dan musholla pada ritual sholat lima waktu relatif sepi. Padahal, 100% atau 2.217 jiwa masyarakat Pekon Kampung Baru beragama Islam.¹¹

2. Sumberdaya Desa/Pekon

a. Sumber Daya Alam (SDA)

Pekon Kampung Baru adalah suatu wilayah yang tergolong kedalam wilayah pedesaan yang sebahagian penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, dengan tingkat perekonomian yang tergolong rendah. Data yang ada menggambarkan betapa besar potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia di desa ini, baik berupa potensi SDA yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Potensi sumber daya alam yang ada pada Pekon Kampung Baru dapat digambarkan sebagai berikut:

SDA yang dapat diperbaharui berupa; aneka macam tumbuhan, tanah, air, pupuk kompos, minyak nilam, pala, kopra, cahaya matahari, hewan, angin, dan lain-lain. Sumberdaya tersebut merupakan representasi dari pemanfaatan wilayah yang ada. Luas wilayah Pekon Kampung Baru adalah 1.350 Ha yang dimanfaatkan untuk: pesawahan 350 Ha, perkebunan rakyat 755 Ha, pemukiman

¹¹ Abdur Rahman, Perwakilan P3NTR Pekon Kampung Baru, *Interview*, Pada Tanggal 11 Oktober 2015

175 Ha, perkantoran Pemda Tanggamus 30 Ha, pekarangan untuk Sekolah Dasar 2 Ha, dan lain-lain 48 Ha.¹²

Menurut Nasrudin, 350 Ha lahan pesawahan dalam kemiringan 30° - 45° dengan warna tanah cokelat kehitaman serta curah hujan dan sinar matahari yang seimbang, maka wilayah Pekon Kampung Baru dan sekitarnya tergolong dalam tanah yang subur. Dialiri air yang bersumber dari irigasi atau tergolong dalam sawah dengan irigasi teknis yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian tidak ada kendala yang serius dalam pengelohannya, sehingga mampu menghasilkan kurang-lebih 4 ton padi per Ha setiap panen.¹³ Areal persawahan selain ditanami padi sebagai tanaman utama, juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman lain, seperti; ubi jalar (ketela), cabe, timun, dan jagung. Hal ini diakui oleh Mat Sobri bahwa: “kami sudah biasa menanam padi, tetapi sewaktu-waktu untuk menjaga kesuburan tanah, kami menanam sayur-sayuran dan tanaman lainnya”.¹⁴ Aktifitas pemanfaatan lahan sawah untuk bercocok tanam sayuran menjadi sebuah indikasi sudah

¹² Profil Pekon Kampung Baru hal. 4, *Dokumentasi*, dicatat pada tanggal 13 September 2015

¹³ Nasrudin, Sekretaris Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada tanggal 5 Oktober 2015

¹⁴ Mat Sobri, Ketua Kelompok Tani, *Interview*, pada tanggal 5 Oktober 2015

adanya diversifikasi pertanian. Namun demikian areal yang ada masih belum membuahkan hasil yang maksimal.

Sementara itu, 755 Ha berfungsi sebagai lahan perkebunan yang bersifat heterogen atau berbagai tanaman ada dalam suatu kepemilikan warga. Menurut Amirzah, lahan perkebunan di Pekon Kampung Baru ada yang bersifat beragam (*heterogen*) disamping ada juga yang bersifat sejenis (*homogen*). Yang bersifat beragam dengan penghasilan ton per hektar setiap tahun, seperti; kopi menghasilkan 0,5 ton per Ha setiap tahun, kakau menghasilkan 0,5 ton per Ha setiap tahun, pisang menghasilkan 2 ton per Ha setiap tahun. Sedangkan duren, manggis, lada, duku, kayu-kayuan, palawija dan lain-lain merupakan penghasilan tambahan.¹⁵ Menurut seorang petani, Imron, bahwa sebagai seorang petani ia menanami lahan miliknya dengan aneka jenis tanaman keras, “kebun saya dan yang lainnya ditanami kopi coklat (kakau), manggis, duren, lada, pala, dan ada kayu sengon”.¹⁶ Sementara yang bersifat sejenis, seperti perkebunan kelapa hibrida. Hal ini diakui oleh Endang Permana, “sebahagian wilayah dusun kami, seperti Dusun Tulung Gistang difungsikan sebagai

¹⁵ Amirzah, Kepala Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 5 Oktober 2015

¹⁶ Imron, S.Sos.I, Adat/Anggota Kelompok Tani, *Interview*, pada Tanggal 5 Oktober 2015

perkebunan rakyat yang khusus ditanami kelapa hibrida juga ada yang beragam, seperti kopi, duren, dan duku”.¹⁷

Potensi SDA yang dapat diperbaharui lainnya adalah air dan hewan. Berdasarkan hasil observasi tim peneliti, Pekon Kampung Baru adalah suatu wilayah yang memiliki air yang melimpah, dimana air mengalir disepanjang pemukiman warga, sehingga sebahagian warga yang memiliki lahan pekarangan yang cukup luas memanfaatkan air untuk membuat kolam ikan.¹⁸ Menurut Sulaiman, Pekon Kampung Baru ini memiliki air yang berlebih, karena dialiri oleh sungai-sungai, seperti; Dusun Cibodas, Way kandis, Sindang Sari dialiri sungai Way kandis dan beberapa mata air, Dusun Tulung Gistang dialiri sungai Tulung Batu kabulung, sungai Tulung Gedung, dan beberapa sumber mata air, Dusun Kampung Baru dialiri Tulung/Sungai Tulung Bukhing dan Sungai besar sebagai pertemuan sungai-sungai yang disebutkan di atas.¹⁹ Karena sumber air yang banyak itulah, Allah melimpahkan karunianya berupa air terjun WayLalaan

¹⁷ Endang Permana, Kepala Dusun Tulung Gistang, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

¹⁸ Sumber Daya Air Pekon Kampung Baru, *Observasi*, pada Tanggal 13 September 2015

¹⁹Sulaiman, Kaur Kersa Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 5 Oktober 2015

1 dan 2 sebagai area wisata, lanjut Amirzah.²⁰ Menurut Endang Permana “lingkungan tempat tinggal kami dialiri air irigasi sepanjang kampung, air yang mengalir di belakang rumah atau didepan rumah kami, bahkan ada air bersih yang bersumber dari mata air dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Air bersih yang dialirkan melalui paralon dan mengalir tanpa henti disetiap rumah warga”.²¹ Dan, menurut Sahrani “Dusun Cibodas tidak memiliki sawah, karena tidak dialiri air yang cukup besar, tetapi kami tidak kekurangan air untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kami mengalirkan air melalui paralon dari sungai Way kandis”.²² Demikian juga Solihin mengatakan, bahwa: “sebahagian Kepala Keluarga Dusun Tulung Gistang memiliki kolam untuk memelihara ikan, karena Dusun Tulung Gistang berdekatan dengan Sungai Tulung Gedung dan dekat dengan beberapa sumber mata air”.²³ Data diatas menjelaskan bahwa sumber daya alam berupa air tersedia secara melimpah, namun belum didayagunakan secara maksimal oleh masyarakat terutama sebagai sumberdaya

²⁰ Amirzah, Kepala Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 5 Oktober 2015

²¹ Endang Permana, Kadus Kampung Baru Induk, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

²² Sahrani, Ketua RT. 06, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

²³ Silihin, Ketua RT. 08, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

ekonomi yang potensial. Pemanfaatan air yang melimpah itu baru sebatas untuk keperluan rumah tangga dan untuk mengairi sawah. Hanya ada beberapa rumah tangga yang memanfaatkan aliran air untuk memelihara ikan, dan itu juga terkesan sekedar mencoba.

Hewan sebagai sumber daya alam menjadi potensi lokal yang diharapkan menjadi penopang ekonomi keluarga. Tetapi, bagi masyarakat Pekon Kampung Baru, hewan ternak merupakan peliharaan yang bersifat pelengkap, dan belum difahami sebagai potensi ekonomi yang strategis dan memiliki prospek ekonomi yang tinggi. Menurut Sulaiman, memelihara ternak, khususnya kerbau dan sapi agak sulit karena susah angonnya, sekarang tidak ada lagi lahan kosong. Oleh karena itu, hanya ada 13 ekor sapi yang dipelihara oleh 8 warga yang diperuntukkan untuk membajak sawah sendiri. Demikian juga dengan ternak sapi, hanya ada 13 ekor sapi.²⁴ Kami juga memelihara ayam kampung, lumayan kalau hari raya dan ada hajatan tidak beli lagi, kalau ada lebih untuk dijual. Juga, ada yang memelihara kambing/domba, itupun tidak banyak, hanya sebagai pekerjaan sambilan sambil mengurus kebun.”²⁵

²⁴ Sulaiman, Kaur Kesra, *Interview*, pada Tanggal 5 Oktober 2015

²⁵ Sahrani, Ketua RT. 10, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

Sementara itu, Pekon Kampung Baru tidak memiliki SDA yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini diakui oleh Amirzah, menurutnya, sebelum Pekon Kampung Baru mengalami pemekaran, disini ada tambang batu alam, tetapi sekarang menjadi bagian dari Pekon Tanjung Jati (pemekaran).²⁶

Menurut Amirzah, selain potensi SDA yang telah dijelaskan di atas, dan belum dijelaskan dalam profil Pekon Kampung Baru karena bukan tanaman rakyat melainkan tumbuh liar, yakni: bambu, enau/aren, dan rotan. Bambu biasanya tumbuh dan berkembang di pinggir aliran sungai dan enau/aren tumbuh dan berkembang di perkebunan warga atau di semak-belukar. Sedangkan rotan tumbuh dan berkembang di hutan reboisasi.²⁷ Menurut Neli, kalau dulu bambu dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk membuat tampah, irik atau hanya sekedar untuk membuat tali. Dan tanaman aren diambil daunnya untuk membuat lepet dan buahnya untuk diambil untuk kulang kaling sebagai bahan menu berbuka puasa di bulan suci romadhon. Sedangkan, rotan dimanfaatkan untuk tali dan bingkai tampah atau irik”.²⁸

²⁶ Amirzah, Kepala Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 5 Oktober 2015

²⁷ Amirzah, Kepala Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 5 Oktober 2015

²⁸ Neli Hairani, Ketua PKK Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 5 Oktober 2015

b. Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai potensi pembangunan dapat diidentifikasi dari kuantitas, kualitas dan kemampuan aktualisasi diri serta partisipasi masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok.

Dari sisi kuantitas, jumlah penduduk Pekon Kampung Baru berjumlah 2.217 jiwa yang terakumulasi dalam 544 KK. Jika luas wilayah Pekon Kampung Baru seluas 1.350 Ha, maka setiap KK memiliki rata-rata 2,48 Ha lahan baik perkebunan maupun pesawahan. Apabila luas wilayah dibagi jumlah jiwa (2.217), maka setiap jiwa memiliki kurang lebih 0.69 Ha.²⁹, Artinya setiap jiwa masih bisa menggunakan lahan (ruang) yang ada seluas lebih dari 0,5 Ha.

Secara kualitas, penduduk Pekon Kampung Baru memiliki 619 SDM yang memiliki pendidikan yang memadai dengan perincian 450 pendidikan SMA dan 169 berpendidikan Akademi/Perguruan Tinggi (PT). Atau, 15.24 % dari jumlah jiwa (2.217 jiwa). Sementara, 1.598 jiwa terdiri dari 133 jiwa pra sekolah, 650 jiwa berpendidikan SD, 650 jiwa berpendidikan SMP, dan 126 tidak tamat SD.³⁰

²⁹ Profil Pekon Kampung Baru, *Dokumentasi*, dicatat pada Tanggal 13 September 2015

³⁰ Profil Pekon Kampung Baru, *Dokumentasi*, dicatat pada Tanggal 13 September 2015

Menurut Damini, 450 jiwa berpendidikan SMA sederajat terdiri dari 50 % berpendidikan SMA, 21 % berpendidikan SMK (SMEA), 16 %, berpendidikan SMK (STM), 13 % berpendidikan MA/PONPES. Sedangkan 169 jiwa berpendidikan Akademi/PT terdiri dari 11 jiwa berpendidikan agama (IAIN Raden Intan Lampung), 10 berpendidikan PGSD, dan 4 berpendidikan PT. umum.³¹ Data diatas menjelaskan bahwa Pekon Kampung baru sebenarnya memiliki Sumber daya manusia yang potensial untuk menjadi factor pendukung dari kemajuan ekonomi desa/pekon. Lebih dari 15% dari Sumber daya manusia yang ada merupakan out-put Pendidikan Tinggi (PT) yang memiliki visi, wawasan, pengetahuan dan ketrampilan tertentu. Hanya saja melihat dari jenis pendidikan nampaknya keahlian yang mereka miliki tidak/kurang relevan dengan kebutuhan dan sumber daya ekonomi yang tersedia.

Dilihat dari profesi yang digeluti, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab profil pekon, bahwa masyarakat Pekon Kampung Baru mempunyai profesi yang beragam, sebagai petani, buruh tani, pedagang, jasa pertukangan, PNS, swasta, dan jasa. Data tersebut menunjukkan profesi utama

³¹ Damini, Ketua Urusan Pembangunan Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 5 Oktober 2015

yang dimiliki secara alamiah oleh masing-masing penyandang profesi, dan bukan hasil pengembangan/pemberdayaan yang didesain sedemikian rupa agar mereka memiliki ketrampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Masing-masing pemilik profesi sebenarnya sudah mengaktualisasikan diri dan partisipasi dalam pembangunan sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing.

c. Sumber Daya Sosial

Proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang memposisikan unsur manusia dan masyarakat dalam proses produksi dan proses sosio-kultural atau sosial budaya tidak bisa dilepaskan dari tiga hal; yakni kepemimpinan, ideologi dan kelembagaan.

Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen yang mampu menjadi inisiator, motivator, fasilitator, coordinator masyarakat atau orang-orang sekelilingnya dalam melaksanakan pembangunan. Otoritasnya bersumber pada kewibawaan pribadi yang pada hakikatnya berdasarkan kharisma yang mereka miliki. Berdasarkan otoritas itu mereka dapat mengendalikan loyalitas pengikut sehingga bisa dimobilisasi untuk tujuan tertentu. Pekon Kampung Baru, sebagai bagian dari pemerintahan menghimpun

sejumlah anggota masyarakat dengan berbagai karakteristik dan segmen masyarakat, dimana masing-masing segmen memiliki kecenderungan digerakkan oleh otoritas sub-sistem kepemimpinan sejalan dengan dinamika dan kebutuhan internal sub-sistem social yang ada.

Secara administratif, Pekon Kampung Baru memiliki struktur pemerintahan pekon yang diangkat melalui pemilihan langsung oleh, dari, dan untuk masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah Kabupaten (Bupati), sedangkan aparat yang ada di bawahnya ditunjuk oleh *Badan HIPPUN Pemekonan* (BHP). Hal ini diakui oleh Mat Sari, bahwa Kepala Pekon dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan, struktur di bawahnya selain Sekretaris Pekon (PNS) ditunjuk oleh BHP berdasarkan musyawarah anggota.³² Dan, BHP lanjut beliau merupakan utusan dari 4 (empat) kelompok adat yang ada di Pekon Kampung Baru dianggap mampu dan cakap mengemban tugas yang diamanatkan kepada mereka. Kelompok adat tersebut menurut Nasruddin, yakni kelompok adat Pariyaman, Banjar Agung, Parda Suka, dan Penyandingan.³³ Sementara itu, menurut Imron, Untuk mengorganisir kegiatan para pemuda,

³² Mat Sari, Ketua BHP Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 5 Oktober 2015

³³ Nasruddin, Ketua Kelompok Adat Banjar Agung, *Interview*, pada Tanggal 5 Oktober 2015

Pekon Kampung Baru memiliki 2 (dua) organisasi, yakni *Karang Taruna* di bawah binaan Kepala Pekon dan Kelompok *Muli Makhanai* (bujang gadis) di bawah binaan kelompok adat.³⁴ Adanya dua organisasi pemuda diatas bukan mengindikasikan adanya dualisme organisasi pemuda, namun lebih pada upaya mengorganisir para pemuda secara proporsional sejalan dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Organisasi Karang Taruna lebih pada posisi sebagai institusi yang mengorganisir para pemuda dalam wadah kegiatan yang bersifat umum, sementara Organisasi *Muli Mekhanai* terkesan sebagai wadah kegiatan pemuda yang bernuansa cultural yang menghimpun dan mengorganisir para pemuda dalam mengelola kegiatan yang bernuansa kultural Lampung.

Sementara dalam pengembangan sisi kehidupan beragama, Pekon Kampung Baru memiliki 6 (enam) majelis ta'lim, yakni majelis ta'lim ibu-ibu.³⁵ Terdapat 5 majlis ta'lim yang menjadi wadah pembinaan kehidupan beragama untuk ibu-ibu (kaum perempuan), sementara hanya ada 1 majlis ta'lim yang menjadi wadah kegiatan pembinaan keagamaan untuk kaum laki-laki. Hal ini menunjukkan

³⁴ Abdur Rahman, Perwakilan P3NTR, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

³⁵ Rahman Zuber, P3NTR, *Interview*, pada Tanggal 5 Oktober 2015

bahwa kelembagaan agama yang mencerminkan bagian semangat keagamaan posisinya belum dilihat sebagai hal yang signifikan dalam system social masyarakat setempat. Terakomodasinya sebagian besar kebutuhan social masyarakat dalam wadah-wadah atau institusi yang bersifat sosio-kultural, menyebabkan masyarakat merasa tidak begitu memerlukan instusi keagamaan sebagai sebuah wadah sosial keagamaan.

Dalam hal system kepemimpinan, Sistem kepemimpinan pada masing-masing institusi kemasyarkatan yang ada agaknya tetap merujuk kepada pola dan system kepemimpinan kultural. Meski dalam beberapa hal merujuk kepada pola dan systrem politik modern (seperti pemilihan pimpinan secara demokratis dll), tetapi kepemimpinan adat tetap menjadi rujukan. Dalam hal mekanisme penentuan pimpinan institusi system demokrasi modern telah menjadi model yang direkrut oleh hampir semua institusi yang ada di tengah masyarakat, kecuali organisasi adat yang sudah memiliki system rekrutmen yang baku. Menurut Kepala pekon, “apapun karakteristik kepemimpinan setiap kelompok/organisasi yang ada di Pekon Kampung Baru kecuali pemimpin adat dipilih secara langsung dan demokratis oleh masyarakat dan selalu ada hubungannya dengan kelompok adat. Misalnya, pemilihan BHP dan

pengurus Karang Taruna, termasuk Kepala Pekon ada konsultasi dengan kelompok adat”.³⁶

Disamping sumber daya sosial dalam wujud system kepemimpinan juga terdapat sumber daya sosial yang berwujud ideologi. Ideologi yang dimaksud disini adalah nilai-nilai yang dianut masyarakat yang bisa menjadi dorongan internal (*inner dynamic*), system motivasi yang mampu menggerakkan dan mendorong terwujudnya tindakan dan perilaku untuk mewujudkan dinamika social-ekonomi, baik pada tataran pribadi maupun pada tataran kolektif, Ideologi social yang terdapat pada masyarakat Pekon Kampung Baru bisa diidentifikasi sebagai berikut :

Pertama, Nilai-nilai social yang mendorong bahkan memaksa penganutnya untuk selalu berpartisipasi. Prinsip partisipasi yang lestari adalah partisipasi yang dimotivasi oleh kesadaran internal untuk mewujudkan tindakan sosial. Gotong royong dan musyawarah sebagai ciri atau karakteristikbudaya masyarakat menjadi akar setiap aktivitas dalam melaksanakan program pemerintahan dan masyarakat pekon. Menurut Damin, setiap kegiatan pekon rencanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama antara aparat pekon, Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dan masyarakat masyarakat, bahkan mendapatkan kritikan-kritikan.

³⁶ Amirzah, Kepala Pekon, *Interview*, pada Tanggal 5 Oktober 2015

Misalnya: (a) penyaluran air bersih yang mengalir 24 jam di Pekon Kampung Baru; (b) pembangunan jalan pekon yang menghubungkan antara pekon induk dengan pusat perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tanggamus; (c) proses perencanaan dan pembentukan panitia pembangunan masjid dan musholla; (d) sekarang ini sedang melaksanakan pembuatan talut dari jalan raya menuju parkirana pariwisata air terjun Way Lalaan. Kesemuanya merupakan inisiatif masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya yang disetujui dalam musyawarah pekon yang dilaksanakan setelah selesai melaksanakan sholat 'idul Fitri atau 'idul Adha.

Kedua, Perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan merupakan bagian esensial dari budaya masyarakat, ia mengalami perubahan dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan kebutuhan yang mendesak. Jika melihat data tingkat pendidikan masyarakat, perubahan pengetahuan masyarakat Pekon Kampung Baru dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berpendidikan SMA sampai Perguruan Tinggi (PT) berjumlah 619 orang, yang terdiri dari SMA berjumlah 450 orang, D-1 s.d. D-3 berjumlah 144 orang, dan PT berjumlah

25 orang. Sedangkan yang berpendidikan SMP berjumlah 650 orang dan SD berjumlah 650 orang.³⁷

Data tersebut menunjukkan ada perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada masyarakat. Menurut para responden yang diwakili oleh *Kaur Kesra*, dengan banyaknya anak muda yang sekolah sampai kejenjang pendidikan tinggi, banyak perubahan yang terjadi di Pekon Kampung Baru, diantaranya: (a) semakin banyak anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi supaya pintar, berfikiran luas, dan tidak kuno; (b) semula bersikap tertutup berubah menjadi lebih terbuka dalam menerima perubahan dan pendapat orang lain. Pola usaha dari pertanian padi atau perkebunan yang bersifat semester atau tahunan berubah menjadi pola usaha bulanan, seperti palawijo bahkan jasa. Perubahan pengetahuan juga tercermin pada perubahan pola hidup yang berhubungan dengan pola hidup sehat. Dibandingkan dengan pada masa lalu kini mayoritas rumah penduduk memiliki jamban keluarga (WC) yang berakibat pada kehidupan keluarga yang lebih sehat; (c) masyarakat memiliki keterampilan yang cukup beragam, diantaranya SMA umum, SMEA akutansi

³⁷ Profil Pekon Kampung Baru tahun 2015, h. 4, *Dokumentasi*, dicatat pada Tanggal 11 Oktober 2015

dan keuangan, STM mesin dan listrik, sarjana computer, sarjana pertanian, sarjana agama, dan Pendidikan Guru.³⁸

Ketiga, Perubahan struktural dalam hal ini dari ikatan social yang bersifat komunal ke asosiasional. Pekon Kampung Baru memiliki sejumlah asosiasi, baik yang bersifat organisasi pemerintahan pekon, seperti; Badan Hippun Pemekonan (BHP); Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 2 Posyandu Balita dan 1 Posyandu Lansia maupun organisasi kemasyarakatan, seperti; 16 kelompok tani, 1 RISMA dan Karang Taruna, 6 Majelis Taklim Perempuan dan 1 Majelis Taklim Pria.³⁹

Sementara itu, lanjut Kaur Kesra, usaha-usaha ekonomi yang ada pada masyarakat masih bersifat personal dengan keterampilan seadanya. Masing-masing organisasi di atas tidak memiliki usaha yang bersifat produktif. Bahkan, kelompok-kelompok tani yang ada dibentuk hanya untuk persyaratan mendapatkan bantuan pemerintah, sedangkan dalam pengelolaannya dilaksanakan sendiri-sendiri.

Keempat, Orientasi pada hasil kerja dan tidak pada status. 677 KK atau 478 rumah huni, diantaranya 80 rumah yang tidak layak atau rumah berdinding papan atau bambu dan

³⁸ Sulaiman, Kaur Kesra, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

³⁹ Profil Pekon Kampung Baru Tahun 2015, h. 5, *Dokumentasi*, dicatat pada tanggal 11 Oktober 15

berlantaikan tanah merupakan realitas keadaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, motivasi masyarakat dalam setiap kegiatan ekonomi adalah untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. *Kaur Kesra* yang didukung semua responden menyatakan: baik petani pemilik lahan, buruh, pedagang maupun yang berkecukupan dan yang miskin, bahkan PNS sekalipun bekerja untuk mendapatkan hasil yang banyak, mencukupi kebutuhan yang layak bagi keluarga menjadi tujuan utama.⁴⁰ Orientasi pada hasil diatas telah sedikit demi sedikit mereduksi sikap mental tradisional yang memandang pekerjaan tertentu sebagai pekerjaan yang merendahkan status, semata-mata menurut parameter gengsi dan lain-lain. Sehingga banyak dari anggota masyarakat yang sudah tidak lagi menghubung-hubungkan pekerjaan yang digeluti dengan gengsi status sosio-kultural yang disandangnya, keculai jika pekerjaan itu patut dianggap hina berdasarkan perspektif etika, moral sosial, dan khususnya yang dipandang tidak patut menurut ajaran agama Islam.

3. Optimalisasi pemanfaatan Sumberdaya Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan hidup adalah tujuan hidup setiap orang, sehingga dengan berbagai cara akan ditempuh untuk meraih

⁴⁰ Sulaiman, Kaur Kesra, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

kesejahteraan hidup. Para responden yang diwakili oleh Sulaiman, mengatakan: “kesejahteraan adalah berkecukupan, cukup untuk makan, cukup biaya sekolah anak, bias punya kendaraan, rumah bagus, banyak uang.⁴¹ pendapat lain adalah sejahtera itu hidup tenang, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, aman dan nyaman beribadah, badan sehat, keluarga tentram.⁴²

Sebagian besar masyarakat desa Pekon Baru memandang bahwa kesejahteraan bukanlah kondisi yang serta merta datang tanpa usaha untuk mewujudkannya. Kesejahteraan hidup harus diperjuangkan dengan bekerja keras sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Pergunakan dan kelola sawah, kebun, dan apa saja yang dimiliki agar menghasilkan.⁴³ Meski juga mereka memandang bahwa usaha untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan hidup tetap harus dikendalikan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Jangan lupa harus usaha yang halal dan baik lanjut Abdur Rahman.

⁴¹ Sulaiman, Kaur Kesra Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

⁴² Abdur Rahman, Perwakilan P3NTR Pekon Kampung Baru, *interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

⁴³ Mat Sobri, Ketua Kelompok Tani, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

Tetapi, menurut masyarakat usaha dan kerja keras untuk mengolah sumberdaya alam yang ada yang sudah dilakukan belum membuahkan hasil yang optimal. Menurut Nasruddin, walaupun sudah bekerja keras membanting tulang penghasilan rata-rata setiap Kepala Keluarga 1 s.d. 2 juta setiap bulan. Sementara itu, jumlah tanggungan per keluarga minimal 3 orang.⁴⁴

Rendahnya pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor: *Pertama*, mayoritas masyarakat tergantung pada aktifitas pertanian yang bersifat musiman, seperti sawah dan kebun. Pola pertanian yang diterapkan masih bersifat tradisional, belum ada kreatifitas dan inovasi yang melibatkan teknologi yang dapat melipatgandakan hasil pertanian yang ada. Sehingga meskipun keberadaan lahan pertanian yang cukup luas namun belum membuahkan hasil maksimal yang bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani desa. Peningkatan hasil pertanian hanya bisa terjadi dengan perbaikan teknologi pengolahan lahan dan teknologi pertanian umumnya.

Kedua, tidak ada pekerjaan sampingan karena kurangnya kemauan dan keterampilan masyarakat untuk mengolah

⁴⁴ Nasruddin, Sekretaris Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

bahan mentah menjadi bahan jadi. Sebagian besar produksi pertanian masyarakat baik berupa hasil sawah maupun hasil kebun berupa Coklat, buah-buahan berupa durian, duku, manggis, hasil kebun berupa petai, pala dan lain-lain dijual ke pengumpul maupun konsumen tanpa pengolahan pasca panen. Dengan demikian belum ada nilai tambah (*added value*) akibat dari pengolahan yang dilakukan terhadap hasil pertanian yang ada.

Ketiga, manajemen pengelolaan hasil pertanian yang belum baik. Pola hidup yang tidak ekonomis terkadang menyebabkan para petani tak segan berhutang terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan mendesak sambil menunggu hasil panen pertanian yang ada. Dengan demikian maka hasil panen telah habis untuk membayar hutang untuk kebutuhan sehari-hari. *Keempat*, Pada komoditas pertanian tertentu terutama sawah, besarnya biaya operasional tidak seimbang dengan penghasilan. Bercocok tanam padi disawah adalah salah satu wujud dari pertanian yang bersifat subsisten. Jika dihitung secara rinci antara modal yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat hamper tidak terdapat selisih. Artinya bahwa menanam padi sebenarnya kurang mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Bagi petani dengan menanam padi maka sudah memiliki pertahanan hidup minimal dalam bentuk ketersediaan beras.

Kelima, Budaya malas yang masih menjangkiti sebagian masyarakat. Bantuan dan rangsangan dana desa yang sudah menjadi program pemerintah pusat desa lebih difokuskan pada pembangunan imprastruktur, seperti; membangun taluta gorong-gorong, dan jalan pekon.⁴⁵, dan belum diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar memiliki kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, kemiskinan masih merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintahan pekon. Berdasarkan data profil Pekon Kampung Baru ada 80 rumah penduduk yang dikatagorikan kurang layak huni dan penghasilan rata-rata per bulan berkisar Rp. 1.500.000 s.d. Rp. 2.000.000,-. Maka, wajar apabila 20 resfonden yang dijadikan sampel menjadikan masalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi masalah utama dan harga jual hasil bumi murah menjadi masalah kedua.

Untuk mengetahui aktivitas dan program, baik oleh pemerintahan pekon maupun masyarakat secara mandiri akan disajikan data tentang pengelolaan sumber daya bagi kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut:

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

SDA Pekon Kampung Baru yang tergolong dalam sumber daya yang dapat diperbaharui terdiri dari tanah, air,

⁴⁵ Sutrisno, Kaur Keuangan Pekon Kampung Baru, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015.

dan Ternak sebenarnya telah dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut pengakuan Mat Sobri, “pada masa-masa yang lalu, pemanfaatan tanah di Pekon kampung Baru selain untuk pemukiman hanya diperuntukkan untuk pesawahan dan perkebunan yang bersifat heterogen dan dikelola secara mandiri. Tetapi, sekarang ini sudah banyak masyarakat memfokuskan usaha taninya pada tanaman-tanaman tertentu, seperti manggis, kakau, durian, dan tanaman kayu serta tanaman palawijo untuk pesawahan.⁴⁶ Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pekon untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, diantaranya:

Pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kelompok tani sebagai organisasi petani yang memperjuangkan kepentingan para petani itu sendiri, walaupun dalam pengelolaan lahan masih dikerjakan serara mandiri. Oleh karena itu, hingga saat ini Pekon Kampung Baru memiliki 16 Kelompok Tani. *Kedua*, melakukan musyawarah pekon untuk membicarakan permasalahan masyarakat dan program pekon pada momen-momen tertentu, seperti; pada bakda sholat jum’at dan hari-hari besar Islam yang bertempat di Masjid. *Ketiga*, mendatangkan PPL

⁴⁶ Mat Sobri, Perwakilan Kelompok Tani, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

pertanian untuk memberikan pencerahan dan keterampilan dalam mengatasi persoalan pertanian. *Keempat*, berupaya mendatangkan bibit-bibit unggul, seperti; bibit padi, tanaman buah-buahan, dan bibit kayu, walaupun ada bantuan secara khusus dari pemerintah yang disalurkan langsung melalui kelompok-kelompok tani, seperti; bibit padi, pupuk, dan obat-obatan pertanian serta mesin bajak.⁴⁷ Disinggung masalah pemasaran hasil, semua responden mengakui masih tergantung pada pembeli-pembeli dari luar.

Sumber daya alam berupa air yang ada di Pekon Kampung Baru yang *notabene* memiliki sumber air yang melimpah, terdiri dari 4 (empat) sungai kecil (disebut tulung), 1 (satu) kali besar (air terjun Way Lalaan). Sebagian besar dari air yang melimpah itu dimanfaatkan untuk kepentingan pesawahan, air bersih, kolam, dan pariwisata.

Menurut para Kepala Dusun yang diwakili oleh Endang Permana, bahwa melihat sumber air yang begitu besar, maka pada tahun 1998 masyarakat yang dikoordinatori pemerintahan pekon sepakat dalam musyawarah pekon secara swadaya berinisiatif mengalirkan sumber mata air yang ada dengan menggunakan paralon untuk kebutuhan air bersih walaupun ada sumber air bersih (PAM) yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Tanggamus. Dana yang bersumber dari

⁴⁷ Amirzah, Kepala Pekon, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

iuran masyarakat dikumpulkan melalui kelompok adat dan RT. Sedangkan pembuatannya dikerjakan secara bersama-sama dibawah koordinasi para Tukang yang ada di Pekon Kampung Baru. Untuk menjaga kelancaran aliran air bersih ditunjuk pengelola yang diberi imbalan bersumber dari iuran bulanan secara rutin. Hingga saat ini Pekon Kampung Baru memiliki 10 sumber air bersih.⁴⁸ Sementara itu, pengelolaan air untuk keperluan kolam ikan masih dikelalo secara mandiri, sehingga belum menunjukkan hasil yang maksimal kecuali untuk memelihara induk ikan dan kebutuhan konsumsi pribadi.

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagaimana telah diuraikan pada potensi SDM pada sub bab sebelumnya, masyarakat Pekon Kampung Baru berjumlah 2217 jiwa. 450 jiwa berpendidikan SMA, 650 jiwa berpendidikan SMP dan 169 jiwa berpendidikan akademi (D-1 s.d D3) dan S-1, selebihnya berpendidikan SD, pra sekolah, dan tidak tamat SD.

Menurut Sekretaris Pekon, SDM tersebut di atas belum dikelola secara optimal untuk kepentingan pembangunan desa dan masyarakat desa. S ebahagian besar lulusan SMP dan SMA mempunyai kecenderungan berurbanisasi ke kota-kota

⁴⁸ Endang Permana, Kadus 1, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

untuk mencari pekerjaan pada Perusahaan-perusahaan swasta termasuk di perusahaan-perusahaan di Pulau Jawa. Sehingga, penunjukan pengurus organisasi-organisasi yang ada berdasarkan kepribadian dan kelompok-kelompok adat yang adat. Misalnya, Ketua BHP berasal dari kelompok adat Banjar Agung, Ketua Karang Taruna berasal dari kelompok adat Penyandingan, Kadus I berasal dari kelompok adat Pariaman.

49

c. Pengelolaan Sumber Daya Sosial (SDS)

Program Kerja yang menjadi panduan pekon dalam melakukan pembangunan desa/pekon adalah hasil kesepakatan atau musyawarah pekon, sehingga dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat, karena tidak mudah menggerakkan masyarakat yang secara financial keuntungannya tidak di depan mata.⁵⁰

Kaur Pembangunan menjelaskan, bahwa untuk melaksanakan program pekon, pemerintah pekon harus bekerja sama dengan para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Karena, masyarakat adat terdiri dari keluarga dan kerabat yang membentuk suatu kelompok, sehingga

⁴⁹ Nasruddin, Sekretaris Pekon, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

⁵⁰ Amirzah, Kepala Pekon, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

ketua adat lebih dihormati dan dihargai. Oleh karena itu, musyawarah pekon lebih sering dilaksanakan di masjid dibandingkan di balai pekon ketika semua komponen masyarakat hadir di dalamnya.⁵¹

Demikian juga dengan pengelolaan ideology yang ada pada masyarakat. Ideologi cultural yang dianut masyarakat disamping menjadi unsur penyangga terwujudnya stabilitas social, juga memiliki daya dorong dalam mewujudkan dinamika social yang bisa berimbas pada aspek ekonomi. Dalam masyarakat memiliki sifat kekerabatan yang sangat kental, dimana sikap kebersamaan, tolong-menolong, dan gotong-royong masih menjadi ikon dalam menggerakkan masyarakat dalam pembangunan.⁵² Walaupun demikian, diakui oleh para tokoh adat, bahwa belum ada aturan-aturan adat yang dilembagakan oleh pekon untuk mengatur urusan masyarakat, karena adanya peraturan perundang-undangan formal yang juga mengikat warga masyarakat dalam bertindak dan berperilaku khususnya dalam konteks pergaulan social.

⁵¹ Damin, Kaur Pembangunan, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober 2015

⁵² Amiruddin HK, Tokoh Adat, *Interview*, pada Tanggal 11 Oktober

B. Potensi Pemberdayaan Sumber Daya Bagi Kesejahteraan Masyarakat

1. Potensi Sumber Daya yang dapat Diberdayakan

Pekon Kampung Baru adalah suatu wilayah yang terletak di jalur jalan lintas barat Sumatera, hanya berjarak 2,5 km dari pantai dan dikelilingi oleh perbukitan. Juga, merupakan wilayah penyangga utama perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus. Suatu kondisi wilayah yang sangat subur untuk berbagai jenis tanaman disatu sisi, disisi lain merupakan wilayah yang ramai dan berpotensi untuk lebih maju menuju masyarakat yang sejahtera apabila masyarakatnya mempunyai ghirah untuk memberdayakan berbagai potensi yang dimiliki, khususnya potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) dan potensi sumber daya manusia (SDM) serta potensi sumber daya sosial budaya. Potensi-potensi sumber daya yang dapat diberdayakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Secara sosio-historis Pekon Kampung Baru merupakan pemukiman baru yang berawal dari pembukaan lahan perkebunan dan pesawahan sebagai salah satu cara yang ditempuh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian berkembang menjadi perkampungan. Sumberdaya Alam yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam pengertian

yang luas, yakni berupa lingkungan fisik baik di daratan, udara, dan air, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan maupun non makhluk hidup, seperti tambang, yang dalam istilah yang digunakan oleh Soetomo adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*).

Dalam pemanfaatan sumber daya alam khususnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui, masyarakat Pekon Kampung Baru telah melakukan upaya optimalisasi fungsi sumber daya sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki secara turun-temurun.

Berdasarkan data yang dihimpun, Sumber Daya Alam yang dapat diberdayakan di Pekon Kampung Baru, diantaranya:

Pertama, optimalisasi pemanfaatan pesawahan dan perkebunan. Hasil panen yang menghasilkan 4 ton per hektar merupakan hasil di bawah standar nasional, yakni 5,1 ton per hektar. Sementara itu, hasil panen padi di Kutai Kertanegara 5,6 ton per hektar dan program pemerintah dengan bibit unggul hibrida bisa mencapai 17 ton per hektar.

Kedua, optimalisasi hasil perkebunan. Perkebunan kakao di Pekon Kampung Baru seluas 30 hektar dengan hasil panen 0,5 ton per hektar setiap tahun. Sementara, Suprapno, petani Desa

Sungai Langka Kecamatan Gedung Tatan, Lampung Selatan membuktikannya. Dia tak perlu merogoh kantong terlalu banyak, untuk merawat 8 hektare kebun kakao. Bayangkan, dengan biaya produksi hampir 0% untuk perawatan, dia bisa memproduksi buah kakao 300 hingga 400 buah per tanaman. Setiap tahunnya dia mendapatkan 20 ton biji basah per hektare atau 1,7 ton biji basah per bulan.

Sedangkan, pemanfaatan lahan yang diperuntukan untuk tanaman pisang di Pekon Kampung Baru hanya 3 hektar dengan hasil panen 2 ton per hektar setiap tahun. Sementara itu, hasil panen rata-rata di wilayah Indonesia mencapai 10-15 ton per hektar setiap tahun di bawah standar produktivitas, yakni 35-40 ton per hektar setiap tahun.

Ketiga jenis tanaman yang banyak ditemui di Pekon Kampung Baru tersebut belum mampu mencapai standar minimal nasional. Karena, belum optimalnya pengelolaan, baik dari segi pengelolaan bibit dan pemeliharaan maupun dari segi pengelolaan hasil panen. Dan, belum ada upaya pengolahan hasil panen yang lebih produktif menuju bahan jadi dengan menggunakan teknologi pertanian yang mampu meningkatkan penghasilan para petani. Menurut Soetomo, peningkatan hasil sumber daya alam hanya bisa dilakukan dengan teknologi yang efektif. Sementara masyarakat Kampung baru masih mengelola

lahan dengan teknologi pertanian yang diperoleh secara turun temurun, tanpa inovasi dan kreatifitas yang terus dikembangkan.

Ketiga, pemanfaatan bahan baku industri yang bersumber dari lingkungan setempat (*industri ekstraktif*), seperti; bambu, lidi kelapa, dan rotan. Bambu merupakan jenis tumbuhan yang tumbuh dan berkembang disepanjang aliran sungai yang hanya dimanfaatkan untuk membuat tali, tampah, dan penyangga tanaman atau gubug. Lidi kelapa juga hanya dimanfaatkan untuk membuat sapu atau terbuang begitu saja. Demikian dengan rotan, dia tumbuh dan berkembang liar ditengah hutan dan dimanfaatkan seperlunya untuk tali atau diambil bagian pucuk untuk dijadikan sayur makan. Padahal, pada daerah-daerah tertentu, seperti jawa dan bali khususnya yang berdampingan dengan area wisata, ketiga bahan baku tersebut diolah sedemikian rupa sehingga berniali seni dan bernilai ekonomis.

Keempat, sumber daya alam berupa air. Sebagaimana dipaparkan pada sub bab data di atas, Pekon Kampung Baru adalah wilayah yang dikarunia Allah SWT air yang berlimpah, baik berupa air sungai maupun sumber mata air. Namun demikian, air yang berlimpah tersebut hanya dipergunakan untuk kebutuhan mandi, suci, dan kakus (MCK). Selebihnya dimanfaatkan untuk mengairi sawah melalui irigasi dan mengairi kolam untuk memelihara induk ikan guna kebutuhan pribadi.

Dalam teori desa wisata yang saat ini sedang diminati masyarakat diberbagai tempat, khususnya di Bandung dan Yogyakarta dan sekitarnya, selain bermanfaat bagi budi daya ikan tawar untuk memenuhi kebutuhan pasar juga dimanfaatkan untuk wisata air dengan desain wisata alamiah. Ikan sebagai sumber protein tinggi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan wisata kuliner.

Kelima, pengelolaan wisata air terjun Way Lalaan. Air terjun Way Lalaan merupakan ikon wisata Pekon Kampung Baru, bahkan salah satu ikon wisata Kabupaten Tanggamus. Pada kurang lebih 10-20 puluh tahun yang lalu, wisata air terjun Way Lalaan menjadi salah satu tujuan wisata pavorit turis lokal dan bahkan tidak jarang turis manca Negara. Tetapi, belakangan ini pengunjung wisata ini menurun sangat tajam, karena hanya menyuguhkan pancaran air terjun dengan pelataran yang gersang yang kehilangan keindahannya. Tidak ada aktivitas masyarakat setempat kecuali pedagang pecel dan gorengan seadanya. Seyogyanya, untuk menarik minat wisatawan dan menambah pendapatan masyarakat perlu adanya pengelolaan wisata berbasis budaya lokal, baik dibidang seni-budaya maupun hasil-hasil keterampilan yang khas masyarakat local.

Keenam, jalur lintas barat yang strategis. Jalur lintas barat yang strategis ditunjang Wisata Way lalaan yang menjadi salah

satu tujuan wisata memotivasi masyarakat untuk mendirikan pondok-pondok kecil di pinggir jalan untuk memasarkan buah-buahan bersifat musiman, karena aktivitas tersebut hanya terjadi apabila ada musim atau tidak permanen. Dalam konsep pengembangan ekonomi masyarakat, jalan raya yang strategis dapat dikembangkan menjadi sentra penjualan hasil bumi dan kerajinan rumah tangga (*home industry*) yang bersifat ekstraktif.

b. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam teori manajemen dan manajemen sumber daya manusia, Sumber Daya Manusia merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting selain sumber daya modal dan sumber daya alam. Karena, sumber daya alam yang melimpah didukung oleh sumber daya modal yang besar tanpa diikuti oleh sumber daya manusia yang berkemampuan/berkualitas, maka pembangunan suatu wilayah atau komunitas tidak akan menunjukkan hasil yang maksimal.

Pekon Kampung Baru sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab tentang profil wilayah dan Sumber Daya Manusia, tidak berarti nama kampung menunjukkan tipologi masyarakat perkampungan, tetapi suatu tempat yang sebahagian wilayahnya (30 Ha) menjadi pusat Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, merupakan jalan penghubung menuju PT. Tanggamus Indah, dan telah berdiri 1 unit Indo Mart sebagai pusat perbelanjaan.

Kondisi ini, menjadikan masyarakat yang dihuni oleh 2.217 jiwa memiliki wawasan yang cukup luas. Terbukti, hingga saat ini Pekon Kampung baru telah memiliki Sumber Daya Manusia berkualifikasi pendidikan Akademi dan S-1 dan S-2 sebanyak 189 jiwa. Ditambah dengan 650 orang lulusan SMA sederajat. Tetapi, motivasi melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lebih terobsesi menjadi PNS dan atau mendapatkan uang dalam bentuk gaji, maka Sumber Daya manusia yang diharapkan berpartisipasi membangun pekon (mulang pekon) berduyun-duyun mengikuti urbanisasi ke kota-kota besar, sekalipun hanya bekerja di pabrik-pabrik industri di negeri seberang. Atau, menjadi tenaga honorer di PEMDA Tanggamus. Sehingga, tingkat partisipasinya dalam pembangunan masyarakat agak terhambat. Dalam perspektif Soeroto, tentang peranan yang bersifat ekonomis, Sumber Daya Manusia sebagai semua kegiatan manusia yang produktif dan semua potensinya untuk memberikan sumbangan yang produktif kepada masyarakat. Demikian juga dengan perspektif Soetomo, selain dilihat dari perspektif ekonomis atau Sumber Daya Manusia hanya semata-mata dilihat dan diposisikan sebagai faktor produksi, sehingga diperlakukan sebagai objek (material). juga dilihat dari aspek sosial-budaya. Karena, dalam perspektif perubahan, faktor manusia merupakan faktor yang utama, sehingga sejatinya manusia merupakan subjek pembangunan.

Kontribusi dan peranan yang dimainkannya tidak hanya ditentukan oleh faktor kuantitas, tetapi juga oleh kualitasnya, baik kualitas kemampuan, prakarsa, dan partisipasi sebagai objek maupun subjek pembangunan.jumlah.

Secara kuantitatif jumlah Penduduk dengan tingkat pendidikan yang baik sebenarnya sudah cukup besar untuk standar masyarakat pedesaan, namun beberapa faktor menjadi penyebab tidak teraktualisasinya factor pendidikan sebagai daya dukung strategis dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat; *pertama*, jenis pendidikan tidak terdiversifikasi dalam jenis pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan aktual masyarakat setempat, *kedua* etos kewirausahaan masyarakat yang masih rendah yang terbukti dengan masih tingginya harapan para generasi muda yang telah mengenyam pendidikan tinggi untuk menjadi ‘orang gajian’ baik sebagai pegawai negeri (PNS) maupun pergi merantau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Pulau Jawa khususnya maupun di daerah lain.Potensi sumber daya alam yang besar, yang memerlukan sentuhan tangan-tangan kreatif dan inovatif belum teraktualisasi menjadi factor strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

c. Sumberdaya Sosial

Sumber Daya Manusia, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan dan atau pemberdayaan masyarakat tidak

hanya diposisikan sebagai faktor produksi, tetapi juga menyangkut proses sosio-kultural. Karena, menurut Sartono Kartodiharjo, dalam karyanya yang berjudul *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, dinamika masyarakat merupakan sumberdaya sosial budaya. Dan, secara historis, ada tiga unsur sumberdaya sosial budaya di pedesaan; yaitu kepemimpinan, ideologi dan kelembagaan.

Masyarakat Pekon Kampung Baru yang secara sosio-kultural terdiri dari multi kultur karena terdiri dari berbagai suku, diantaranya suku Lampung pribumi sebagai penduduk mayoritas, suku Jawa, suku Sunda, dan suku Padang yang memiliki tradisi yang berbeda-beda. Karena secara kultural sosial budaya masyarakat Indonesia tidak jauh berbeda, maka yang berkembang adalah satu tradisi yang diikuti oleh berbagai suku, yakni tradisi penduduk asli. Baik dalam bidang kepemimpinan, ideology, dan kelembagaan.

Pekon Kampung Baru secara administratif merupakan bagian dari pemerintahan kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tangamus. Oleh sebab itu, pemerintahan pekon mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembangunan di bawah koordinasi pemerintahan kecamatan dan kabupaten. Tetapi, pemerintahan pekon sebagai bagian dari masyarakat tidak terlepas dari sosial budaya masyarakat yang dipimpinnya.

Misalnya, mulai dari system pemilihan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi program sangat dipengaruhi oleh system kekerabatan kelompok adat setempat. Kerja sama pemerintahan pekon dengan kelompok adat terus dijaga, karena pengaruh dan kewibawaan ketua adat sebagai salah satu elit masyarakat sangat menentukan dalam memobilisasi masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan pekon.

Masyarakat pedesaan, secara historis memiliki tingkat partisipasi yang dilandasi kesadaran yang tinggi dalam beraktivitas. Tingginya tingkat partisipasi dapat dilihat dari semangat gotong royong, suka berbagi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Semangat gotong royong, berbagi, dan kerja koperasi sebagai idiologi hanya terjadi pada momen-momen tertentu, seperti membangun rumah, menanam padi, dan membersihkan lingkungan, perlu ditumbuh kembangkan dalam usaha-usaha produktif.

Masyarakat yang selalu berinteraksi dengan masyarakat lain, baik secara individu maupun kelompok dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap perkembangan zaman, baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam bidang keterampilan berusaha. Masyarakat Pekon Kampung Baru sebagai bagian dari perkembangan tersebut mengalami perubahan. Semangat untuk meningkatkan

pengetahuan khususnya melalui pendidikan formal cukup tinggi, terlihat dari 169 lulusan akademi dan perguruan tinggi, 650 lulusan SMA sederajat serta 650 lulusan SMP sederajat. Tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi tersebut berpengaruh terhadap sikap keterbukaan masyarakat, terutama keterbukaan dalam menerima perubahan, menghormati pendapat orang lain, dan kritis terhadap permasalahan.

Salah satu ideology masyarakat yang belum mampu diberdayakan adalah ideology budaya berupa nilai-nilai atau norma adat yang bersifat mengikat dalam proses pembangunan. Misalnya, belum ada aturan yang mengikat tentang pasangan suami istri yang bercerai tanpa alasan yang jelas dan melakukan perselingkuhan. Padahal, dalam tradisi adat Lampung pernikahan, perceraian, dan perselingkuhan merupakan bagian dari peran dan fungsi adat. Nilai-nilai dan kekayaan budaya local dalam hal ini belum memainkan fungsi optimal dalam system social masyarakat.

2. Proses Pemberdayaan Sumber Daya Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Pada dasarnya, masyarakat Pekon Kampung Baru telah melaksanakan proses pemberdayaan dengan tahapan dan prinsip-

prinsip pemberdayaan jelas. Misalnya, dalam melaksanakan sebahagian program pekon, melalui tahapan sebagai berikut: *Pertama*, memberikan pemahaman tentang kebutuhan pekon; *Kedua*, melakukan musyawarah pekon untuk membicarakan permasalahan masyarakat dan program pekon pada momen-momen tertentu, seperti; pada bakda sholat jum'at dan hari-hari besar Islam yang bertempat di Masjid. *Ketiga*, mendatangkan PPL pertanian untuk memberikan pencerahan dan keterampilan dalam mengatasi persoalan pertanian. *Keempat*, berupaya mendapat bibit-bibit unggul, seperti; bibit padi, tanaman buah-buahan, dan bibit kayu, walaupun ada bantuan secara khusus dari pemerintah yang disalurkan langsung melalui kelompok pertanian serta mesin bajak.

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Kampung Baru merupakan realisasi teori tentang tahapan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana ditulis oleh Menurut Tim Delivery yang dikutip oleh Totok Mardikanto, menyebutkan 4 (empat) tahapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni: (a) tahap seleksi lokasi/wilayah; (b) tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat; (c) proses pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan: (1) kajian keadaan pedesaan partisipatif; (2) pengembangan kelompok; (3) penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan; (4) monitoring dan evaluasi partisipatif. (d) tahap pemandirian masyarakat. Dan,

khusus tahap pemandirian, tidak perlu dilakukan, karena program yang dilakukan berdasarkan inisiatif dan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Oleh karena itu, tahapan-tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat masih terbatas pada program-program tertentu yang bersifat social dan belum pada program yang bersikap ekonomis. Misalnya, program mengalirkan air bersih, program pembuatan jalan pekon, program kebersihan lingkungan. Sementara itu, program pemberdayaan yang mampu memperbaiki kualitas hidup adalah program pemberdayaan yang bersifat ekonomis didukung dengan program yang bersifat sosial yang berbasis sumber daya lokal.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip partisipatif, keberlanjutan (*sustainable*), kerja kolektif hanya berlaku pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan belum pada kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomis

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Banyak atau tidaknya potensi sumber daya suatu daerah bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan tinggi rendahnya kualitas hidup suatu masyarakat. Tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Contoh, Pekon Kampung Baru memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah, Sumber Daya Manusia yang besar dan memadai, Sumber Daya Sosial yang tinggi, tetapi masyarakatnya belum merasa sejahtera. Hasil Sumber Daya Alam masih dibawah standar penghasilan nasional dihitung per hektar setiap tahun. Air yang melimpah hanya untuk kebutuhan MCK. Sumber Daya Manusia yang memadai lebih memilih menjadi buruh pabrik atau tenaga honor dibandingkan mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Proses pemberdayaan yang dilaksanakan secara parsial dan tidak terintegrasi (*integrated program*) kurang memberikan manfaat. Proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Pekon Kampung Baru terbatas pada program yang bersifat sosial dan belum pada program yang bersifat ekonomis. Sehingga, kesejahteraan secara *financial* masih menjadi permasalahan utama bagi masyarakat

B. Saran

a. Pemerintah

Program pemberdayaan masyarakat lebih ditekankan pada partisipasi masyarakat secara swadaya dan fokus pada pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Sosial. Karena, program pemberdayaan yang difokuskan pada infrastruktur akan menimbulkan kejenuhan dan menghilangkan prinsip keberlanjutan.

b. Masyarakat

Apa yang ada dilingkungan kita bernilai sosial dan ekonomis. Takut mencoba, gagal dan takut rugi adalah penyakit. Mencoba, rugi, dan gagal adalah pengalaman. Oleh sebab itu, bekerja secara kelektif adalah upaya untuk menghilangkan rasa keraguan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia Theresia dkk., *Pengembangan Berbasis Masyarakat Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, sebagaimana dikutip oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko S dalam *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013),
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Nat J Colleta dan Umar Kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan*, (Jakarta; Yayasan Obor, 1985)
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Rustian Kamaluddin, *Beberapa aspek pembangunan Nasional dan Daerah*, (Jakarta:: Ghalia Indonesia, 1983)
- Sartono Kartodiharjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1987)

- Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012),
- , *Pembangunan Masyarakat merangkai sebuah kerangka*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012),
- Sofyan Effendi dkk., *Membangun Martabat Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996),
- Sudarmayanti, *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 13
- Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2004)
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Suparjan, *Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003)
- Soeroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 1983)
- Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)
- _____, *Kesejahteraan dan Upaya mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014)
- Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012)
- Soetomo, *Pembangunan Masyarakat merangkai sebuah kerangka*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012)
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

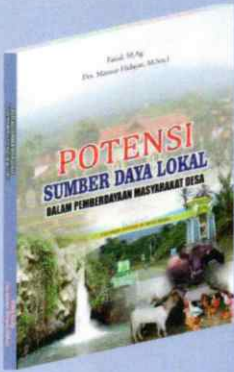
<http://news.kutaikartanegarakab.go.id/produksi-perhektar-padi-kukar-diatas-standar-nasional/>, *diunduh*, pada Tanggal 31 Oktober 2015

<https://ceritanurmanadi.wordpress.com/2013/05/22/panen-padi-17-tonha/>, *diunduh*, pada tanggal 31 Oktober 2015

<http://s0t4.blogspot.co.id/2009/10/kencing-semut-hitam-dongkrak-produksi.html>, *diunduh* pada Tanggal 31 Oktober 2015

<https://warasfarm.wordpress.com/2013/05/13/budidaya-pisang-yang-menguntungkan>, *diunduh* pada Tanggal 31 Oktober 2015

<http://3rafika.blogspot.co.id/2009/11/kawasan-industri.html>, *diunduh* pada tanggal 30 Oktober 2015



Banyak atau tidaknya potensi sumber daya suatu daerah bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan tinggi rendahnya kualitas hidup suatu masyarakat. Tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Contoh, Pekon Kampung Baru memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah, Sumber Daya Manusia yang besar dan memadai, Sumber Daya Sosial yang tinggi, tetapi masyarakatnya belum merasa sejahtera. Hasil Sumber Daya Alam masih dibawah standar penghasilan nasional dihitung per hektar setiap tahun. Air yang melimpah hanya untuk kebutuhan MCK. Sumber Daya Manusia yang memadai lebih memilih menjadi buruh pabrik atau tenaga honor dibandingkan mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Proses pemberdayaan yang dilaksanakan secara parsial dan tidak terintegrasi (*integrated program*) kurang memberikan manfaat. Proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Pekon Kampung Baru terbatas pada program yang bersifat sosial dan belum pada program yang bersifat ekonomis. Sehingga, kesejahteraan secara *financial* masih menjadi permasalahan utama bagi masyarakat.

